

SKRIPSI

PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA DIGITAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA



Oleh :

MIKEL KELVIN

B 111 09438

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

HALAMAN JUDUL

PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA DIGITAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Disusun oleh :

MIKEL KELVIN

B 111 09438

SKRIPSI

Untuk diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka
Penyelesaian Studi Sarjana di Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2016**

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA DIGITAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh

MIKEL KELVIN

B111 09 438

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Selasa, 7 Juni 2016
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Maskun, S.H., LLM.
NIP. 19761129 199903 1 005

Birkah Latif, S.H., M.H., LLM.
NIP. 19800908 200501 2 002

**A.n. Dekan
Wakil Dekan I,**

Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Mikel Kelvin

Nomor Induk : B 111 09 438

Bagian : Hukum Internasional

Judul : PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI
MELALUI MEDIA DIGITAL MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 7 Juni 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.Maskun,S.H.LL.M.
NIP.19761129 199903 1 005

Birkah Latif,S.H.M.H.LL.M.
NIP.19800908 200501 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Mikel Kelvin
Nomor Induk : B 111 09 438
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Internasional
Judul : PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI
MELALUI MEDIA DIGITAL MENURUT HUKUM
INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI
INDONESIA.

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 7 Juni 2016

a.n Dekan
Wakil Dekan I

Prof.Dr.Ahmadi Miru,SH.,MH.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

MIKEL KELVIN, B11109438, PENGATURAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MELALUI MEDIA DIGITAL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA. Dibawah bimbingan Maskun sebagai Pembimbing I dan Birkah Latif sebagai Pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional dan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode yuridis normatif. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan penelusuran melalui media digital. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematik terhadap ketentuan internasional dan penerapannya di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaturan yang jelas mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital dalam hukum internasional. Di dalam *UDHR* dan *ICCPR* serta berbagai instrumen hukum internasional lainnya telah jelas dan tegas diberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan terhadap kebebasan berekspresi. Namun demikian terdapat benturan – benturan kebebasan berekspresi dengan berbagai aspek lain misalnya sifat intoleran dari beberapa pihak, kebijakan politik yang tidak demokratis dan kendala – kendala teknis berkaitan dengan sistem kerja media digital sehingga muncul berbagai pembatasan. Sebagai negara hukum demokratis, Indonesia telah melakukan penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi dengan meratifikasi seluruh isi *ICCPR* melalui UU No.12 Tahun 2005 dan memberi perlindungan secara utuh terhadap Hak Asasi Manusia melalui UU No.39 Tahun 1999. Khusus mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital telah diatur melalui UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai Hak Asasi Manusia (HAM) yang fundamental dan merupakan bagian dari hak politik dan hak pribadi, kebebasan berekspresi mutlak harus dilindungi. Namun mengingat bahwa dalam hal pemenuhan hak akan timbul pula kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang. Berbagai kasus tentang kebebasan berekspresi melalui media digital menjadi saksi dari proses penegakkan Hak Asasi Manusia Ini.

ABSTRACT

MIKEL KELVIN, B11109438, THE REGULATION ON FREEDOM OF EXPRESSION THROUGH DIGITAL MEDIA IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN INDONESIA. Under the guidance of Maskun as Supervisor I and Birkah Latif as Supervisor II. Faculty of Law, University of Hasanuddin.

This Legal research is aimed to find out about The regulation on freedom of expression through digital media in accordance with international law and its implementation in Indonesia. This research is a prescriptive-normative legal research. The method which is used in this research is normative-juridical method. Secondary data sources which are used include the primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques which is used are literature study and search through digital media. The data obtained and analyzed by grammatical interpretation and systematic interpretation of the rules of international law and its implementation in Indonesia.

The result shows that there are clear regulations on freedom of expression through digital media in international law. The UDHR, ICCPR and other international legal instruments have been clearly and unequivocally given legal protection for compliance of freedom of expression. However, there are lot of conflicts of freedom of expression with a variety of other aspects such as the intolerant of several parties, undemocratic political policies and technical obstacles relating to the concept of digital media so there are various restrictions. As a democratic State of Law, Indonesia has made the implementation of international law on freedom of expression by ratifying the entire contents of ICCPR through Law No.12 of 2005 and provide full protection on Human Rights by Law No.39 of 1999. Freedom of expression through digital media has been regulated through the Act No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. As fundamental human right which is part of political rights and personal rights, freedom of expression must be protected absolutely but considering that in the enjoyment of rights would arise obligation to honor and respect the rights of others, the exercise of those rights may be restricted by laws. Various cases concerning freedom of expression through digital media become witnesses of this human rights enforcement process.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat, pertolongan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “Pengaturan Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital Menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, sejak penyusunan proposal, penelitian hingga penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak **Dr. Maskun, SH.,LL.M.** selaku pembimbing I dan Ibu **Birkah Latif, SH.,MH.,LL.M.** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing penulis.

Terkhusus skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu penulis, **Dra. Erna Simatauw** yang selama ini memberikan perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih yang paling dalam dari lubuk hati. Juga Kakak penulis **Devvy Yondy** dan Adik penulis **Nesyi Sifra** yang senantiasa menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin

2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak/Ibu para Dosen Penguji dan Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bimbingan dan limpahan ilmunya yang tak ternilai.
4. Seluruh pegawai dan staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis melewati proses administratif yang melelahkan.
5. Rekan – rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dari angkatan 2009 sampai 2015 yang menjadi bagian dari cerita penuh makna perjalanan penulis sebagai mahasiswa
6. Serta sahabat – sahabat di berbagai kegiatan ekstrakurikuler maupun lembaga yang pernah penulis singgahi, di **Pramuka Horas, Paskibra Spensel, Paskibra SMAN 6 Makassar, Asian Law Students' Association, ILSA, KKN 85 Pulau Sebatik, LPM. Psikogenesis, LBB. Primagama, Delegasi UNHAS untuk NMCC 2010 dan 2011, Delegasi UNHAS untuk Harvard National MUN 2012, Makassar International Writers Festival 2015 dan 2016, IMS, UNHAS MUN Club, PMK FH UH, Ligamers, Socio Trip, Klinik Hukum, Student X CEO, Bhinneka Camp.**

Tentu masih banyak lagi yang penulis tak dapat sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk setiap bantuan moral dan materil untuk setiap dukungan, motivasi dan kritikan, pengetahuan serta kebersamaan yang telah diberikan dan terlebih atas doa untuk penulis.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan pada skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas.

Makassar, 7 Juni 2016

Mikel Kelvin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berekspresi	11
B. Tinjauan Umum tentang Media Digital	19
B.1. Definisi Media Digital.....	19
B.2. Perkembangan Teknologi	21
B.3. Ruang Lingkup Media Digital	24
C. Tinjauan Yuridis tentang Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital	31
C.1. <i>Universal Declaration of Human Rights</i>	31

C.2. <i>International Covenant On Civil and Political Rights</i>	48
C.3. Perbandingan Praktik Negara – Negara	53
C.4. Pengaturan Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital di Indonesia	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Jenis Penelitian	61
B. Sifat Penelitian	62
C. Pendekatan Penelitian	63
D. Jenis Data	63
E. Sumber Data	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	66
E. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV PEMBAHASAN	70
A. Pengaturan Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital menurut Hukum Internasional.	70
B. Penerapan Pengaturan Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital di Indonesia.....	84
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk paripurna di antara makhluk lainnya di muka bumi ini.¹ Sebagai pertanda makhluk paripurna, dapat dilihat dari hakekat abstrak kodrat manusia itu sendiri, yaitu makhluk yang monodualistik sekaligus monopluralis. Dikatakan monodualistik karena kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus makhluk yang mandiri, susunannya terdiri dari jiwa dan raga serta sifat kodratnya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Hakekat kodrat manusia masing-masing merupakan biner paradoksal, namun ketiganya terhimpun menyatu dalam diri pribadi manusia sehingga disebut sebagai monopluralis.

Eksistensi manusia sebagai makhluk paripurna karena mampu berinteraksi dengan seluruh aspek diluar dirinya yang ada di alam semesta. Kemampuan ini jelas merupakan suatu hal yang sangat spesial dan tidak dimiliki oleh makhluk lain.

Terkait dengan kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Hak-hak ini merupakan karunia dari

¹ Sulikha, *Skripsi-Studi Komparasi Antara Konsep Insan Kamil Menurut Al-Ghazali Dan Konsep Kesempurnaan Manusia Menurut Abraham Maslow*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Fakultas Dakwah. hal. 45.

Tuhan Yang Maha Esa bagi manusia sejak ia dilahirkan karena eksistensinya tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor stratifikasi dan difersifikasi sosial seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan. Kemudian dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi dari pada hukum buatan manusia. Oleh karena itu terhadap hak ini, disatu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya karena itulah, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (*non derogable rights*). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali Indonesia sebagai negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Keinginan untuk mengekspresikan diri muncul sebagai konsekuensi logis dari hakikat manusia sebagai *zoon politicon* (makhluk sosial) yang mana dalam menjalin komunikasi dengan sesamanya pasti berdasar pada bentuk ekspresi personalnya. Menurut Abraham Maslow, manusia memiliki Hierarki Kebutuhan

yang puncaknya adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri atau dengan kata lain menampilkan ekspresinya dimuka umum.²

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan eksese dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.³

Kebebasan berpendapat seperti yang sering didengungkan akhir-akhir ini, pasca reformasi, seolah-olah membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah.

² C.George Boeree, 2008, *General Psychology*, 2008, Prismsophie, Yogyakarta, hlm.133

³ John W, Johnson, 2001. "*Peran Media Bebas*". Office of International Information Programs U.S. Departement of State, hlm.51

Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan di Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayaknyalah pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku pengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis ketika ia cukup siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat melalui media apapun.⁴

Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negara-negara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet. Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya.

Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka

⁴ *Ibid*, hlm.56

untuk mengantisipasinya banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya.

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.

Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita bernama Prita Mulyasari yang terjerat salah satu pasal dalam UU tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf Internasional, yakni RS. OMNI Internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (*E-mail*), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik. Prita mengirimkan *E-mail* berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke *customer_care@banksinarmas.com* dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra”. *E-mail*-nya menyebar ke beberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat

yang disandangnya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik. Namun penulis tidak akan membahas lebih dalam mengenai kasus ini.

Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini. Meskipun banyak juga yang beranggapan bahwa kebebasan yang diberikan cenderung kebablasan dan tidak memandang hak-hak serta kewajiban yang lain.

Undang- Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang

diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara.

Setiap orang harus memiliki seluruh alat dan mekanisme yang diperlukan yang memungkinkan terjadinya aliran bebas informasi. Banyak tulisan yang sudah dihasilkan tentang kebebasan berekspresi melalui media digital bahkan kebebasan berekspresi merupakan salah satu konsep dan isu yang paling sering diperdebatkan pada era dimana segalanya telah didigitalisasi. Kemampuan manusia untuk mengembangkan teknologi digital telah menciptakan fenomena sosial baru dimana hubungan antarmanusia pasti akan terpengaruh.

“Freedom of Expression means an open space not only for the media, but also for whole societies. The free flow of information empowers people to claim their rights in the public arena...”⁵

yang artinya kurang lebih adalah Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai wilayah terbuka tidak hanya bagi media, namun juga bagi seluruh masyarakat. Kebebasan arus informasi memberi kekuatan pada masyarakat untuk mengklaim hak mereka di muka public atau secara terbuka.

Dengan demikian adalah sebuah keharusan bagi masyarakat untuk mengetahui seluruh perangkat norma hukum yang mengatur

⁵ Navi Pillay, *High Commissioner for Human Rights*, 2011

tentang Kebebasan berekspresi sehingga masyarakat dapat mengerti *Legal standing* mereka dalam berekspresi dimuka umum.

Harapan Penulis adalah penelitian ini dapat memberi pencerahan dan pengetahuan hukum yang cukup mengenai implementasi kebebasan berekspresi masyarakat melalui media digital baik di level internasional maupun nasional.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian karena perumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi hal yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh

peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Internasional khususnya mengenai pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital.
- b. Untuk penyusunan skripsi guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah Penelitian diharapkan mampu memberi manfaat yang luas bagi masyarakat dan tentunya merupakan kontribusi nyata Penulis bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memberi dua jenis manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumber pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum media serta HAM pada khususnya
- b. Sebagai bahan referensi dalam hal pendalaman ilmu hukum media dan HAM khususnya dalam bidang kebebasan berekspresi melalui media digital

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah di harapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan produk hukum mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital seperti revisi UU ITE.
- b. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi setiap insan dalam mengekspresikan dirinya terutama melalui media digital.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kebebasan Berekspresi

“Freedom of Expression is a fundamental right” ⁶ yang dapat diartikan Kebebasan Berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar. Itulah sebuah penegasan bahwa kebebasan berekspresi adalah pondasi (dasar) dari penegakkan Hak Asasi Manusia. Kebebasan Berekspresi berasal dari kata benda bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata kerja ekspresi (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.⁷

Kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan

⁶ Dalam sesi paling pertama pada 1946, Pendapat Majelis Umum PBB (A/RES/59(1): Para 1)

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

tanpa memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan.⁸

Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara atau berpendapat. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi amat terkait erat dengan konsep lain yang disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan pers lebih difokuskan pada media cetak dan penyiaran, khususnya yang terkait dengan jurnanisme dan jurnalis.

Kebebasan berekspresi adalah suatu hak asasi yang fundamental, yang tercermin sebagai bagian penting dan tidak terpisahkan dari nilai – nilai otonomi pribadi dan demokrasi. Ada hubungan langsung antara kebebasan berekspresi dengan kebebasan untuk berpikir dan langkah penting dalam penyaluran ide dan gagasan oleh setiap individu. Kesempatan setiap individu untuk mengemukakan ide maupun gagasan mereka secara terbuka merupakan bentuk aktualisasi diri konkrit yang akan menempatkan mereka sebagai anggota masyarakat secara penuh dan bebas berekspresi adalah ciri masyarakat demokratis.

⁸ UNESCO, *Glosarium Toolkit Kebebasan Bereksprei bagi Aktivis Informasi* tentang kebebasan berekspresi, hal.77

Demokrasi sendiri tergantung pada orang-orang yang mampu membentuk masyarakat tempat mereka tinggal, dan untuk melakukan hal ini mereka perlu untuk mengekspresikan diri. Hak untuk kebebasan berekspresi secara luas dilihat sebagai hak asasi manusia. Kebebasan dalam hal berekspresi menjamin pertukaran pandangan dan pendapat yang diperlukan untuk menginformasikan ide maupun gagasan. Kebebasan berekspresi, bagaimanapun, memerlukan platform publik.

Kebebasan berekspresi hanya bisa menjadi pilar yang efektif bagi demokrasi dan hak asasi manusia jika dapat dilaksanakan secara terbuka. Jika informasi dan ide-ide dapat secara bebas dipertukarkan antara warga negara tanpa rasa takut. Untuk alasan ini, media secara luas diakui sebagai elemen penting dari proses demokrasi karena merupakan alat transaksi informasi publik. Hari ini, apa yang kita kenal sebagai 'media' telah berkembang secara *offline* yakni cetak dan media penyiaran tradisional serta online yang berupa informasi digital yakni internet, media sosial dan berbagai platform digital lainnya.

Kebebasan berekspresi sesungguhnya bukan ide eksklusif Amerika Serikat. Istilah “kebebasan berekspresi” itu sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, setidaknya semenjak masa Socrates dan Plato, saat Polis Athena di Yunani masih berjaya sekitar 2400 tahun yang lalu. Akan tetapi, jenis kebebasan berekspresi pada saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. Semenjak saat itu, istilah “kebebasan

berekspresi” digunakan dengan amat luas dan dikonseptualisasikan oleh berbagai kelompok.⁹

Sejarah modern dari Kebebasan berekspresi di mulai pada abad ke-14 dimana percetakan mulai berkembang di Eropa. Lalu perlindungan pertama di dunia terhadap hak untuk bebas berekspresi diberikan oleh Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat pada abad ke-18. Perjuangan selanjutnya setelah Amandemen Pertama adalah kesulitan untuk mendefinisikan arti dari kebebasan berekspresi yang menyebabkan munculnya berbagai masalah. Tiga topik utama dalam setiap perdebatan mengenai kebebasan berekspresi adalah bagaimanakah wewenang pemerintah dalam membatasi kritik atau serangan dari masyarakat, wewenang pemerintah untuk memberi sensor terhadap terbitan pers, dan wewenang pemerintah untuk melarang publikasi mengenai ide atau informasi yang diyakini memberi dampak buruk bagi masyarakat.¹⁰

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi adalah kebebasan anggota masyarakatnya untuk mengutarakan ide maupun gagasannya secara terbuka tanpa dibatasi melalui media apapun.¹¹ Tentunya hal itu berkaitan dengan esensi

⁹ *Ibid*, Hal.16

¹⁰ Don R.Pember and Clay Calvert, 2008, *Mass Media Law*, McGraw-Hill Companies, Inc. New York, hlm.40

¹¹ Cummings, Milto C. dan David Wise, 1985, *Democracy Under Pressure*, Harcourt Brace Jovanovich Publishers, hlm.50

demokrasi yang memberikan hak individu terhadap warga negaranya. Kebebasan ini harus dijamin pula di dalam undang-undang negara yang bersangkutan.

Undang-undang yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi itu harus dengan tegas mencantumkan adanya kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tertulis. Dalam rangka penegakkannya, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus pula ada ketentuan undang-undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

John W, Johnson memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers sebagai bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara-negara bagian maupun nasional.¹² Jelas bahwa yang ingin di garis bawahi oleh Johnson, bahwa kebebasan berekspresi masyarakat adalah suatu bentuk implementasi dari prinsip demokrasi bebas Amerika yang harus dilindungi.

Sedang Menurut Bonaventure Rutinwa: *"freedom of expression consists of two elements : the first is the freedom to seek, receive and*

¹² John W, Johnson, *Op.cit*, hlm.53

impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. Thus the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception".¹³

Penekanan Rutinwa ada pada perlindungan substansi ide dan bentuk penyaluran yang bisa bermacam-macam sehingga pemerintah sebagai pemegang otoritas harus dapat mengaturnya secara baik.

Amien Rais sendiri menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni: kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan beragama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.¹⁴

Walaupun seringkali dianggap sebagai prasyarat dasar demokrasi, elemen kebebasan berekspresi adalah suatu hak yang kompleks. Hal ini karena kebebasan berekspresi tidak absolut dan diiringi dengan tugas dan tanggung jawab khusus dan karenanya wajib mematuhi sejumlah pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dan

¹³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan MK*. Konstitusi Press, Jakarta, Hlm.17

¹⁴ Krisna Harahap.2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti. Kuntjoro, hlm.73

diperlukan. Hak ini juga kompleks karena hak ini melindungi hak pembicara sekaligus hak pendengar. Kedua sisi hak yang sama ini kadang dapat bertentangan dan sulit untuk didamaikan. Kedua hak ini terkadang mengalami ketegangan karena tidak selalu mudah menemukan keseimbangan yang tepat antara hak atas kehormatan, keselamatan dan privasi.

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, jelaslah bahwa *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan dalam pasal 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam “*The European Convention on Human Right*” menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian dan sekaligus bentuknya. Seperti yang ditegaskan dalam pasal 19 (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide-ide dan informasi dapat diterima (*received*) atau ditransmisikan (*transmitted*) secara lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih oleh komunikan atau penerima informasi.

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. Bahkan, dalam sidang pertama PBB pada tahun 1946, sebelum disahkannya *Universal Declaration on Human Rights* atau traktat-traktat diadopsi, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.

59 (I) terlebih dahulu telah menyatakan bahwa “hak atas informasi merupakan hak asasi manusia fundamental dan standar dari semua kebebasan yang dinyatakan ‘suci’ oleh PBB”.¹⁵

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat penting yang memungkinkan berlangsungnya demokrasi dan partisipasi publik dalam pembuatan keputusan-keputusan. Warga negara tidak dapat melaksanakan haknya secara efektif dalam pemungutan suara atau berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik apabila mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendapatkan informasi dan mengeluarkan pendapatnya serta tidak mampu untuk menyatakan pandangannya secara bebas. Kebebasan berekspresi tidak hanya penting bagi martabat individu, tetapi juga untuk berpartisipasi, pertanggungjawaban, dan demokrasi.

Sistem nilai yang menjelma dalam konsep HAM tidaklah semata-mata sebagai produk barat, melainkan memiliki dasar pijakan yang kokoh dari seluruh budaya dan agama. Dimana keyakinan manusia akan eksistensinya selalu berkaitan dengan kepentingan individu yang mana di anggap sebagai perwujudan manusia yang otonom. Pandangan dunia tentang HAM adalah pandangan kesemestaan bagi eksistensi dan proteksi kehidupan dan kemartabatan manusia.

¹⁵ Dalam sesi paling pertama pada 1946, Majelis Umum PBB berpendapat bahwa “*Freedom of Information is a fundamental human right and is the touchstone of all the freedoms to which the United Nations is consecrated (A/RES/59(1): Para 1)*”

B. Tinjauan Umum tentang Media Digital

B.1. Definisi Digital

Digital berasal dari kata *Digitus*, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabilakita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh (10). Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2 *radix*, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu Digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya. Dapat disebut juga dengan istilah Bit(*BinaryDigit*).¹⁶

Peralatan canggih, seperti komputer, pada prosesornya memiliki serangkaian perhitungan biner yang rumit. Dalam gambaran yang mudah-mudah saja, proses biner seperti saklar lampu, yang memiliki 2 keadaan, yaitu Off (0) dan On (1). Misalnya ada 20 lampu dan saklar, jika saklar itu dinyalakan dalam posisi A, misalnya, maka ia akan membentuk gambar bunga, dan jika dinyalakan dalam posisi B, ia akan membentuk gambar hati. Begitulah kira-kira biner digital tersebut.

Media digital merupakan bentuk media elektronik yang menyimpan data dalam wujud digital, bukan analog. Pengertian

¹⁶ Rachman, Zulfikar Mochamad. 2007. *Bikin Telecenter Yuk!. Tim Partnership for e- Prosperity for the Poor (Pe-PP)* Bappenas- UNDP. Jakarta. hlm.25

dari media digital dapat mengacu kepada aspek teknis (misalnya harddisk sebagai media penyimpan digital) dan aspek transmisi (misalnya jaringan komputer untuk penyebaran informasi digital), namun dapat juga mengacu kepada produk akhirnya seperti video digital, audio digital, tanda tangan digital serta seni digital. Media digital merupakan perangkat dalam bentuk media elektronik dimana data disimpan dalam bentuk digital. Perangkat ini juga sangat pesat berkembang seiring dengan berjalannya kecanggihan teknologi saat ini.

Banyak orang telah menggunakan perangkat digital untuk mempermudah aktivitas mereka maupun digunakan untuk hiburan semata. Asosiasi industri media digital Florida, *Digital Media Alliance Florida* mendefinisikan media digital sebagai konvergensi kreatif seni digital, ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis untuk ekspresi manusia, komunikasi, interaksi sosial dan pendidikan. Media digital penggunaannya pun sangatlah mudah tidak terkesan kuno seperti alat-alat analog yang masih menggunakan sistem manual. Pada perangkat digital ini kita dapat mengerjakan sesuatu secara cepat atau istilahnya instan tanpa banyak menggunakan tenaga manusia. Teknologi digital terutama digunakan dengan media komunikasi fisik baru, seperti satelit dan transmisi serat optik. Modem digunakan untuk mengubah informasi digital di komputer ke sinyal analog untuk

saluran telepon dan untuk mengkonversikan sinyal telepon analog ke informasi digital untuk komputer. Teknologi digital pada dasarnya sistem yang menghitung secara cepat yang memproses semua bentuk informasi sebagai nilai-nilai numeris. Teknologi ini juga dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 (bilangan biner) untuk memproses informasi yang lebih mudah, cepat dan akurat dan sinyal tersebut disebut bit.

B.2. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi sangatlah pesat seiring berjalannya waktu. Sejarah penemuan teknologi komunikasi pertama dipelopori oleh Alexander Graham Bell, yang menemukan telepon pada tahun 1875. Setelah itu teknologi yang mendasar kembali ditemukan pada tahun 1980 dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan PC (*PersonalComputer*). Dan dari sinilah terjadi revolusi-revolusi dari teknologi mekanik dan teknologi analog ke teknologi digital yang telah terjadi dari tahun 1875 dan sampai saat ini terus berlanjut. Revolusi ini berawal dari teknologi analog kemudian berlanjut ke revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi digital yang menandai awal era informasi saat ini. Teknologi digital dikonversi dari analog ke dalam sebuah format digital. Misalnya dalam komunikasi digital, *hardware* atau perangkat keras memperkuat

sinyal digital dan menyebarkannya tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Hal ini juga memudahkan dalam memindahkan data digital antara media setara untuk mengakses atau mendistribusikannya jarak jauh.

Tahun 1910-1920 lahir sebuah teknologi tanpa kabel yaitu radio AM yang perkembangannya sangat pesat, kemudian disusul audio-visual tanpa menggunakan kabel yang dinamakan televisi. Semua teknologi komunikasi berawal dari teknologi analog yang dimana penggunaanya dengan program-program yang sederhana bahkan ada yang sampai menggunakan tenaga manusia. Informasi yang dikirim melalui teknologi analog berupa gelombang elektromagnetik yang bersifat *cariabel* yang berkelanjutan. Kemudian komputer atau PC adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan akurat serta pengoperasiannya secara otomatis untuk menyimpan dan menerima data input, memprosesnya dan menghasilkan output dibawah pengawasan suatu langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori. Pengolahan data menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik (PDE) atau *Electronic Data Processing* (EDP). Komputer sering kita gunakan untuk mengerjakan sesuatu yang rumit menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan komputer juga bisa digunakan sebagai sarana hiburan pribadi dengan bermain game yang banyak

terdapat pada komputer. Hingga sekarang banyak teknologi yang telah diperbaharui bahkan telah tercipta teknologi teknologi digital yang dapat mempermudah pekerjaan manusia. Kapasitas memori yang besar dapat mempermudah kita untuk menyimpan data yang banyak serta membantu ingatan kita yang terbatas. Telah banyak teknologi yang melakukan transisi dari analog ke digital.

Digitalisasi menjadi topik hangat yang di diskusikan di industri media secara internasional. Konvergensi dan digitalisasi tidak dapat dipisahkan. Tidak akan pernah ada kovergensi media yang benar dan lengkap tanpa digitalisasi media. Sebaliknya, digitalisasi merupakan konsekuensi logis dari pertumbuhan konvergensi media. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi menetapkan tahun 2018 sebagai target 'Digital Indonesia' Tahun tersebut akan menandai titik dimana Indonesia akan digital secara penuh dalam hal informasi komunikasi teknologi dan media, meninggalkan teknologi analog yang selama ini dipakai.

B.2. Ruang Lingkup Media Digital

Untuk mempersempit ruang berpikir kita dan merupakan fokus dari penelitian ini, maka pembahasan Media Digital hanya akan berpusat pada Internet saja. Tidak mudah untuk

mendefinisikan tentang apa itu internet, sebab tiap orang akan berpendapat lain jika ditanya tentang pengertian internet. Istilah internet merupakan akronim dari *Interconnection Networking*, dalam dunia globalisasi internet diartikan sebagai *global network of computernetwork*.¹⁷

Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar, sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi, bahkan satu negara yang dapat menanganinya sendiri. Internet adalah "*anetwork of computer networks*", kita dapat memikirkannya sebagai suatusistem yang mengkombinasikan berbagai komputer dari seluruh dunia kedalam satu komputer raksasa yang dapat dioperasikan dari komputer personal di depan kita.

Beberapa pengertian Internet menurut beberapa literatur :

- a) Internet dapat didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan.¹⁸
- b) *The US Supreme Court*, mendefinisikan internet sebagai "*internasional network of interconnected computers*,"

¹⁷ Johnny Ibrahim.2005. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, hlm.324

¹⁸ mypersonallibraryonline.com

(jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan).¹⁹

- c) Agus Rahardjo mengistilahkan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis *transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP).²⁰
- d) Internet adalah sebuah jaringan mengglobal yang terbentuk dari berbagai jaringan komputer, masing-masing jaringan tersebut terbentuk secara terdesentralisasi namun saling terkoneksi melalui protokol yang disebut TCP/IP.²¹
- e) Internet adalah produk teknologi, maka pendefinisian pun sebaiknya mengikuti terminologi teknis. Namun, istilah internet lalu dianggap mewakili medium tunggal, bukannya jaringan atau infrastruktur bagi pertukaran data digital atau "*information superhighway*". Penyederhanaan tersebut dilakukan pula oleh sebagian pengamat/ilmuwan dari disiplin ilmu komunikasi, yang menyebutkan Internet sebagai *new media* dalam konteks sebuah medium tunggal, namun kadang memisahkannya.

¹⁹ Abdul Wahid dan Moh. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 31

²⁰ *Ibid.* Hal. 59

²¹ John December. 2006. "Defining Units of Analysis for Internet-based Communication". *Journal of Computer Mediated Communication*. Vol. 5, No. 1. hlm. 2

John December dalam *Journal of Computer Mediated Communication*. December dalam artikelnya *Defining Units of Analysis for Internet-based Communication* menawarkan bahwa kajian komunikasi berbasis Internet harus diarahkan pada bagian-bagian yang lebih spesifik, karena Internet bukan medium tunggal namun memiliki berbagai bentuk media didalamnya.

*Internet communication is not a single medium sharing common time, distribution, and sensory characteristics, but a collection of media that differ in these variables. I define a unit of analysis called a media space, which uses the client-server-content triad as the basis for its definition. This concept of media space is one way to describe how the Internet consists of a range of media.*²²

Menurut John December tersebut, Internet diposisikan sebagai infrastruktur telekomunikasi data digital, sementara yang dimaksud *new media* adalah aplikasi-aplikasi komunikasi antar manusia yang menggunakan jaringan Internet sebagai saluran pertukaran datanya. Internet diasosiasikan sebagai sistem jalan raya yang digunakan orang untuk membawa benda-benda dari satu tempat ke tempat lain. Jika jaringan jalan raya di dunia nyata digunakan untuk memindahkan benda-benda fisik berbasis atom, maka Internet digunakan untuk memindahkan material digital.

Dengan medium internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terbatas

ruang dan waktu, menjadi lebih mudah. Seiring dengan semakin populernya internet sebagai “*thenetwork of the network*”, masyarakat penggunanya yang disebut *internetglobal community* (*netizen*) seakan-akan mendapati dunia baru yang dinamakan “*cyber space*”. Howard Rheingold mengatakan, *cyber space* adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.²³ Lain dengan Howard, Agus Rahardjo menyebut *cyber space* sebagai sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) yang menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut realitas virtual (maya).

Terdapat teknologi lanjutan yang berlandaskan pada teknologi internet. Teknologi *web*, *e-mail* dan *chatting* adalah teknologi yang melahirkan ruang interaksi antar manusia melalui perantaraan jaringan internet. Teknologi *web* melahirkan *world wide web*, teknologi *email* melahirkan sistem persuratan elektronik, teknologi *chatting* melahirkan aplikasi dan ruang *chatting*/percakapan tersinkron (*synchronous*) di ruang maya. Ketiga aplikasi ini merupakan aplikasi yang paling sering digunakan sebagian besar pengakses internet, itulah sebabnya

Internet sering diartikan sama dengan *world wide web*, *email*, dan *chatting*. Pada perkembangannya sekarang teknologi web bahkan telah mampu mengintegrasikan fungsi *email* dan *chatting* dalam suatu halaman *web*.

Awal munculnya internet tidak terlepas dari perang dingin antara UniSoviet (USSR) dan Amerika Serikat setelah PD II dalam uji coba yang dilakukan oleh *US Departement of Defense* (departemen pertahanan Amerika Serikat) pada tahun 1969 dengan nama *APRAnet (AdvanceResearch Project Agency Network)*. *APRAnet* dibangun dengan maksud untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila terdapat satu jaringan yang terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.

Pada mulanya jaringan ini disebut *DARPA internet*, lalu hanya disebut internet saja. Selanjutnya, seiring dengan diciptakannya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*, maka metode pengiriman data melalui jalur komunikasi dengan menggunakan kelompok-kelompok data dengan tujuan masing-masing dalam satu paket menjadi sangat mudah, sehingga pada tahun 1980, *National Science Foundation (NSF)*

secara bertahap mengembangkan jaringannya dengan nama NSFNet. Selanjutnya internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis, dengan menghubungkan berbagai perguruan tinggi. Awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja, meliputi *remote acces*, *e-mail/messaging*, maupun diskusi melalui *newsgroup (usenet)*, belum ada layanan berbasis WWW (*World Wide Web*) seperti saat ini. Layanan berbasis WWW dirancang oleh Berners Lee di laboratorium *Conseil Europeen pour la Recherche Nuclaire* (CERN) di Jenewa.

Sejak saat itulah pemakaian internet mulai menjamur di berbagai belahan dunia, hingga pada sekitar tahun 1994 masuk ke Indonesia. Sebelumnya beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terhubung dengan jaringan internet melalui *gateway* yang menghubungkan Universitas dengan *network* di luar negeri.

Secara umum, media internet memiliki kelebihan dibandingkan media lain yang selama ini ada, diantaranya adalah

: 24

1) Kelebihan media internet :

a) Efisien, dalam hal waktu;

- b) Tanpa batas, penjelajahan melalui internet tidak mengenal batas baik ruang/tempat maupun waktu (*Absence of boundaries*);
- c) Terbuka selama 24 jam (*24 hours online*), internet dapat diakses selama 24 jam, jadi sewaktu-waktu penjelajah dunia virtual dapat melakukan penjelajahannya;
- d) Interaktif, terdapat banyak situs-situs yang menyediakan fasilitas interaktif dapat diakses melalui media internet;
- e) Terjalin dalam sekejap (*Hyperlink*), informasi yang tersedia tersaji dalam bentuk *hyperlink*, berarti pengunjung dapat melompat dari satu informasi ke informasi yang lain baik yang mempunyai ikatan langsung maupun tidak memiliki ikatan.

2) Kelemahan media internet :

- a) Kesenjangan digital (*Digital Divide*) Kesenjangan digital adalah adanya jarak/kesenjangan antara mereka yang memiliki akses terhadap teknologi digital dengan mereka yang tidak memiliki akses;
- b) *Content Credibilitz*. Internet dapat diakses oleh hampir semua orang pada wilayah yang amat sangat tersebar. Telah lama dipercaya bahwa konten yang beredar melalui jaringan internet dapat dibuat oleh siapa saja dengan

menyembunyikan identitas diri, sehingga kredibilitas konten menjadi sangat lemah.

C. Tinjauan Yuridis tentang Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital

C.1. *Universal Declaration of Human Rights*

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar manusia. Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang menyatakan bahwa

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers” ²⁵

Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

The Charter of Human Rights and Principles for the Internet yang dikembangkan oleh *Internet Rights and Principles Coalition* mendefinisikan kebebasan *online* untuk berekspresi

²⁵

www.un.org

sebagai salah satu kebebasan yang diakui. Ini berarti kebebasan ini sejajar dengan kebebasan untuk menyatakan protes, kebebasan dari penyensoran, bebas atas informasi, kebebasan media, dan kebebasan dari kebencian atau *hatred speech*.²⁶

Dalam konteks pemajuan hak asasi manusia, besarnya pengguna internet ini tentu melahirkan banyak peluang. Mencuplik pernyataan dari Frank La Rue, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, dalam laporannya mengatakan bahwa internet telah menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan berbagai hak asasi manusia, memberantas ketidakadilan, dan mempercepat pembangunan dan kemajuan manusia. Oleh karena itu, memastikan akses universal terhadap Internet harus menjadi prioritas bagi semua negara. Sinyalemen ini dikuatkan dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan HAM PBB pada Juli 2012 tentang *The promotion, protection and enjoyment of human rights on the Internet*, yang menempatkan akses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Lalu apa sebenarnya kebebasan berekspresi itu. Para sarjana berpendapat, salah satunya seperti dikemukakan oleh John Locke, bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan

sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya untuk mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus miskonsepsi kita atas fakta dan nilai.

Sementara John Stuart Mill mengatakan, kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran. Kenapa demikian, sebab suatu pemerintahan yang demokratis mensyaratkan warganya dapat menilai kinerja pemerintahannya. Dalam memenuhi kebutuhan kontrol dan penilaian itulah warga musti memiliki semua informasi yang diperlukan tentang pemerintahnya. Tidak sebatas itu, syarat berikutnya warga dapat menyebarluaskan informasi tersebut, dan kemudian mendiskusikannya antara satu dengan yang lainnya.

Berangkat dari sandaran teori tersebut, kebebasan berekspresi kemudian menjadi sebuah klaim untuk melawan penguasa yang melarangnya atau pun menghambat pelaksanaan kebebasan berekspresi. Lalu, seperti dikemukakan di awal, kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kewenangan militer. Kaitan kebebasan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional

hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.

Selaras dengan itu, dalam laporan tahun 2010, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue mengatakan, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang bisa mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka tepat. Kebebasan berekspresi menurut La Rue bisa dilihat dari dua cara, pertama hak untuk mengakses informasi, dan kedua hak mengekspresikan diri melalui medium apapun. Selain itu, La Rue juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dilihat sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi. Pondasi utama dalam

menentukan batasan konsep dan cakupan jaminan hak atas kebebasan berekspresi mengemuka di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948, yang menegaskan: Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah. Ketentuan tersebut selanjutnya dielaborasi dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang secara detail dan rigid merumuskannya sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam ayat (2) pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu,

namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Komite Hak Asasi Manusia menekankan Pasal 19 paragraf dua di atas, pada dasarnya adalah melindungi semua bentuk gagasan subjektif dan opini yang dapat diberikan/sebarkan kepada orang lain. Sementara dalam paragraf satu Pasal 19 Kovenan, kebebasan berpendapat dikatakan sebagai urusan pribadi yang terkait dengan alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak boleh dibatasi oleh hukum atau kekuatan lainnya. Sesungguhnya hak untuk berpendapat tumpang tindih dengan kebebasan berpikir, yang dijamin Pasal 18. Kebebasan berpikir berkontribusi dalam kebebasan beropini, dimana pendapat adalah hasil dari proses pemikiran. Mengenai cakupan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana ditegaskan dalam Kovenan, Komentar Umum No. 34 menyebutkan:

“... Semua bentuk opini dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama.Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, mengadili atau memenjarakan karena alasan pendapat mereka, merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1)”.

Kebebasan berekspresi memainkan peran yang amat penting dalam telaah hukum terhadap internet. Pakar kebebasan

berbicara Dawn C. Nunziato menulis bahwa internet telah terkonseptualisasi sedemikian rupa menjadi semacam forum untuk kebebasan berekspresi dengan potensi nyaris tak terbatas bagi setiap individu guna mengekspresikan dirinya dan menerima ekspresi dari individu lain. Meski cenderung berlebihan, pernyataan tersebut agaknya kian mengejawantah belakangan ini. Forum-forum dunia maya bermunculan dan semakin berkembang: dari yang hanya bisa berkirim teks dan gambar menjadi forum-forum yang menyediakan peranti pesan suara dan video.

Hak atas kebebasan berekspresi (*right to freedom of expression*), secara hukum internasional, diatur dalam UDHR dan ICCPR. Secara khusus, Pasal 19 UDHR, Pasal 19 ayat (1) dan (2) ICCPR, dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*, 1989) menjamin seorang individu atas hak menyatakan pendapat dan bebas berekspresi tanpa gangguan. Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan kebebasan untuk mencari (*to seek*), menerima (*to receive*), dan menyampaikan (*to impart*) informasi dengan cara apa pun. Dengan demikian, hak atas kebebasan berekspresi kemudian melahirkan hak atas informasi. Negara yang tak mengizinkan rakyatnya mengakses internet adalah negara yang merugi sebab internet memiliki

potensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Jurang kesejahteraan yang teramat dalam di antara negara-negara di dunia tentu bisa diatasi dengan internet. Apabila setiap orang mau belajar dengan memanfaatkan potensi internet sebesar-besarnya, tak akan dapat disangkal, mereka akan memiliki intelektualitas yang melebihi generasi sebelumnya. Intelektualitas yang demikian ini disebut intelektualitas virtual, yakni intelektualitas yang lahir berkat dunia virtual.

Pertama-tama yang perlu kita garis bawahi bahwa Kebebasan Berekspresi adalah bagian penting dari terpenuhinya Hak Asasi Manusia. Definisi Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut:

- 1) Definisi Hak Asasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak asasi adalah hak-hak yang bersifat dasar atau pokok (seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan) ²⁷
- 2) Manusia adalah makhluk yang berakal dan berbudi (mampumenguasai makhluk lain; insan; orang) ²⁸
- 3) Definisi menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat Hak yang

²⁷ Anton. M. Moeliono, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD*. Jakarta : Ghalia Pustaka. hlm.292

²⁸ *Ibid*, hlm.558

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia meliputi :

- 1) Persamaan harkat dan martabat persamaan tidak berarti serupa atau bahkan mirip dipandang dari sudut jasmani dan rohani, bakat dan ciri masing-masing. Tetapi yang dimaksud disini adalah perbedaan-perbedaan yang ada sejak manusia itu dilahirkan, seperti warna kulit, raut muka, ras, dan suku bangsa tidak mempengaruhi haknya sebagai manusia. Membedakan mereka berdasarkan warna, ras atau suku bangsa merupakan suatu penolakan dari persamaan ini dan juga merupakan ketidakadilan.²⁹
- 2) Anti Diskriminasi adalah suatu prinsip dasar yang tertera dalam seluruh deklarasi. Menjamin tidak adanya perbedaan dalam hal kebebasan dan hak yang didasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin atau agama dalam sistem hukumnya.
- 3) *Derogable* dan *Non Derogable Right* adalah Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir,

²⁹

Leah Levin.1987. *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm.43

hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pembeda seperti agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu bersifat supra legal, artinya tidak bergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan dimiliki setiap manusia. Bukan karena perbuatan amal dan kemurahan negara, tetapi karena berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia.³⁰ Maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya sehingga hak asasi manusia tidak dapat dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia tersebut.³¹ Hak-hak yang termasuk kedalam hak *non derogable right* atau hak-hak mutlak yang tidak dapat dikurangi ialah :

- a) Hak hidup;
- b) Hak bebas dari penyiksaan;

³⁰ Shad Saleem Furuqi.1998. *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu? Beberapa Penjelasan Tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Soejono Soekanto, hlm.13

³¹ Rozali Abdulah dan Syamsir.2002. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.10

- c) Hak bebas dari perbudakan;
- d) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian(utang);
- e) Hak bebas dari pemidanaan yang surut;
- f) Hak sebagai subyek hukum;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.

Namun tidak semua yang disebut hak asasi manusia bersifat mutlak dan tidak terbatas, sebab terdapat hak-hak yang disebut *derogable right* atau hak-hak yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Hak-hak tersebut meliputi :

- a) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- b) Hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan;
- c) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat dan berekspresi termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (tertulis atau lisan)³²

- 4) Pada perkembangannya, hak asasi manusia dinilai bersifat universal, namun karena masyarakat memperhatikan keragaman kebudayaan dan tradisi masyarakat tersebut serta perkembangan sosial, ekonomidan politik, sehingga tidak ada kesepakatan di seluruh dunia tentang hak-hak mana yang betul-

³² Ifdhal Kasim.2001. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM, hlm. xii-xiii

betul mendasar bagi keberadaan umat manusia. Perbedaan kebudayaan merupakan fakta antropologi, sedangkan hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Ini berarti bahwa penegasan relasivitas serta penyangkalan terhadap universalitas nilai-nilai hak asasi manusia tidak mampu menjelaskan ajakan lintas budaya.³³

- 5) *Equality before the Law* yang artinya Persamaan di Depan Hukum. Setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³⁴
- 6) Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi semua golongan minoritas terhadap bentuk diskriminasi apapun yang merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.³⁵

Tinjauan Hak Asasi Manusia menurut *The Universal Declaration of Human Rights* (DUHAM) 1948. Deklarasi yang disahkan tanggal 1 Desember 1948 ini terdiri atas 30 pasal yang diantaranya mengatur hak-hak kemerdekaan, persamaan, kebebasan, hak hidup, tidak diperbudak, tidak dianiaya, keadilan, hak untuk berdomisili di suatu tempat, berkewarganegaraan,

³³ Shad Saleem Furuqui, *Op.cit.* hlm.26

³⁴ Darwin Prinst.2001. Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.13

³⁵ Leah Levin, *Op.cit.*, hlm.41

berkeluarga, hak untuk memiliki sesuatu, berpendapat, berserikat, jaminan sosial, pekerjaan, beristirahat, pengajaran, dan lain-lain.³⁶

Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights*(DUHAM) menyatakan “semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) tertulis “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukannya.” Kedua pasal tersebut merupakan hakekat tentang hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Right* (DUHAM) 1948.

Dari hakekat tersebut, munculataturan-aturan yang tidak spesifik dibuat dengan melibatkan banyak bangsa bangsa di dunia. Hukum konvenan ataupun statuta dilahirkan dan dijadikan aturan main dalam tertib dunia dari hak-hak kebebasan. Hak-hak ini secara garis besar dapat dibagi dalam dua macam hak.

³⁶

Djaka Wahyu Winarno. Makalah: “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia”. UNS, Surakarta, 16 November 2007, hlm.2

Pertama berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik, termasuk di dalamnya hak untuk hidup, kebebasan, keamanan pribadi; kebebasan dari penganiayaan dan perbudakan; partisipasi politik; hak-hak atas harta benda, perkawinan dan kebebasan dasar untuk menyatakan pendapat, ungkapan, pikiran, suara hati dan agama; kebebasan untuk berkumpul dan bersidang. Kedua adalah hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang berhubungan dengan pekerjaan, tingkat kehidupan yang pantas, pendidikan dan kebebasan hidup berbudaya.³⁷ Prioritas yang mendasari hak-hak yang diumumkan dalam Deklarasi inidimuat dalam mukadimah Deklarasi tersebut, yang dimulai dengan mengakui “martabat dan hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia”.

Jumlah pengguna internet di dunia pada tahun 2015 berjumlah 3,2 Milyar orang.³⁸ Sedangkan jumlah pengguna facebook di dunia per 2016 telah mencapai angka 1038 Milyar orang.³⁹ Jumlah ini menandakan begitu tingginya minat orang berkomunikasi melalui media digital utamanya internet.

Pelapor khusus PBB *Frank La Rue* menyatakan bahwa hak untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak

³⁷ Lean Levin, Op.cit.hlm.8

³⁸ www.itu.int

³⁹ statista.com

dasar termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, pendidikan. Selain itu hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan, hak untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan, serta hak-hak sipil dan politik, seperti hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di internet juga realisasi dari hak asasi manusia lainnya.⁴⁰

Internet menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyatakan pendapat dan ekspresinya. Ekspresi ini bukan tanpa aturan, semua aspek yang meliputi kegiatan berekspresi pasti akan dan harus dilegitimasi dan dilindungi oleh hukum. Sebagai Badan Utama, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi pada tanggal 16 Desember 1966, melalui pasal 19 di dalam Kovenan⁴¹ menyatakan bahwa :

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

⁴⁰ www.ohchr.org

⁴¹ wikimedia.org

3) Pelaksanaan hak-hak tersebut turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal (pembatasan) ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi (nama baik) orang lain dan melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan ataupun moral umum/publik.

Internet memungkinkan individu untuk menyebarkan informasi dalam situasi "*real time*". Dalam perspektif lain, internet dapat digunakan sebagai sarana untuk memobilisasi massa sehingga menciptakan ketakutan penguasa. Banyak cara dilakukan oleh penguasa untuk melakukan pembatasan di Internet. Aktivitas memblokir konten, memantau dan mengidentifikasi aktivis dan kritikus, kriminalisasi bagi orang yang menyatakan pendapat dan berekspresi merupakan pelanggaran untuk membungkam kebebasan berpendapat di Internet.

Pelapor Khusus PBB Frank La Rue menekankan bahwa standar hak asasi manusia internasional, khususnya pasal 19 ayat 3, dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, tetap relevan dalam menentukan jenis pembatasan yang melanggar kewajiban negara untuk menjamin hak kebebasan berekspresi.

Internet merupakan gerbang dunia yang telah meningkatkan permintaan akan kebebasan berekspresi dan hak-hak asasi manusia universal lainnya seperti memfasilitasi diskusi yang dinamis dan terbuka tentang berbagai topik serta menghubungkan warga satu dengan lainnya dan dengan warga lain diseluruh penjuru dunia.

Hillary Clinton menyatakan bahwa internet telah menjadi ruang publik abad 21, pusat keramaian, ruang kelas, pasar, kedai kopi dan klub malam dunia. Internet membentuk dan dibentuk oleh apa yang terjadi di sana. Kesemuanya itu berjumlah 2 miliar (dan bertambah terus) dari kita (di dunia maya). ⁴²

Di ruang publik baru yang disesaki oleh pemberitaan dan perbincangan ini, para jurnalis dapat memainkan peran yang penting dalam upaya mencari kebenaran, menganalisis sebuah tren, menjaga kredibilitas, dan menyajikan berita untuk kepentingan publik. Tak diragukan lagi bahwa kehadiran era digital, evolusi internet, kemunculan bentuk media baru, serta kebangkitan jejaring sosial, telah memicu perdebatan mengenai makna menjadi seorang jurnalis, peran yang bisa dimainkan blogger, serta akan seperti apa akibat dari makin tipisnya perbedaan antara jurnalis warga masyarakat (*citizen journalist*)

⁴² antara.com

dan jurnalis professional terhadap media di masa kini dan masa yang akan datang.

C.2. *International Covenant On Civil and Political Rights*

Kovenan hak Sipil dan Politik pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, sehingga dalam hal ini hak-hak yang diatur di dalamnya disebut juga hak-hak negatif (*negatif rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang diatur harus dijamin akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Kovenan hak Sipil dan Politik bertujuan untuk menjamin, melindungi hak orang-perorang berkaitan dengan keamanan pribadi, kebebasan, proses hukum, partisipasi dalam kehidupan politik, keyakinan dan juga kebebasan politik. Dalam *preamble* perjanjian internasional hak sipil dan politik dari PBB dirumuskan "*these right derive from inherent dignity of human person*" (hak-hak berasal dari martabat yang inheren dalam manusia). Hak ini sifatnya sangat mendasar dan asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya.⁴³

⁴³

Miriam Budiardjo.1996. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.140

Sedangkan substansi dari Hak Sipil dan Politik meliputi:⁴⁴

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau penghinaan;
- 3) Hak untuk tidak diperbudak;
- 4) Hak kebebasan dan keamanan pribadi;
- 5) Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan pengadilan badan peradilan;
- 6) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
- 7) Hak sebagai subyek hukum;
- 8) Hak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama;
- 9) Hak untuk berpendapat, berkumpul dan berserikat;
- 10) Hak untuk menikah dan berkeluarga;
- 11) Hak anak atas segala peraturan perlindungan yang diperlukan bagi statusnya, hak untuk didaftarkan dan diberi nama setelah lahir, hak untuk memperoleh kewarganegaraan;
- 12) Hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan pemerintahan;
- 13) Hak untuk memilih dan dipilih melalui pemilu yang bebas;
- 14) Hak memperoleh akses pada pelayanan umum atas dasar persamaan dalam arti umum;

⁴⁴ Kanwil Depkumham Jawa Tengah.2007. Makalah: "Bunga Rampai Hak Asasi Manusia". 16 November 2007, Surakarta, hlm.15-17

15) Hak atas persamaan kedudukan dihadapan hukum
(nondiskriminatif)

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik ini telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam peraturan perundang-undangan No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil Dan Politik), sehingga Indonesia terikat dalam seluruh bagian dari substansi konvensi tersebut sebab telah menjadi bagian dari salah satu hukum tertulis di Indonesia.

Tidak ada pengertian khusus tentang hak asasi manusia dalam UUD1945. Hak-hak asasi manusia diuraikan dalam Pasal 28 A sampai Pasal 28 setelah mengalami amandemen kedua yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa manusia berhak atas hidup dan penghidupan yang layak, berhak atas pendidikan, perlindungan didalam hukum kebebasan beragama dan berpendapat, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak yang diatur dalam undang-undang ini adalah hak hidup, hak untuk berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Dalam undang-undang ini juga mengatur secara khusus hak anak dan wanita.

Kebebasan berekspresi dalam hak asasi manusia. Munculnya hak atas kebebasan berpendapat dimulai saat terjadinya *Glorius Revolution* di Inggris pada tahun 1689, pada saat ditetapkannya *Bill of Rights*. *Bill of Rights* sendiri merupakan dokumen penting dalam rangka menghormati hak asasi manusia. Pada dokumen tersebut, hak-hak individu dan kebebasannya mendapat perlindungan formal dalam undang-undang. Revolusi tersebut ditujukan kepada Raja Charles II, yang isi undang-undang tersebut antara lain :

- 1) Pemilihan anggota Perlemen harus dilakukan dengan bebas dan rahasia;
- 2) Diakuinya kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat;

3) Warganegara Inggris mempunyai hak untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut kepercayaannya itu.

Setelah munculnya *Bill of Rights* di Inggris tersebut, menimbulkan banyaknya negara-negara yang mengadopsi ketentuan-ketentuan tentang hak-hak individu, khususnya perlindungan berpendapat tersebut. Diantaranya yang terjadi di Amerika Serikat, dimana telah terbentuk *Bill of Rights Virginia* yang telah diamandemen, dan dalam amandemen pertamanya terdapat ketentuan mengenai perlindungan terhadap kebebasan beragama, kebebasan Pers, kebebasan menyatakan pendapat dan hak berserikat. Mulai sejak saat itu hak kebebasan berpendapat mendapat respon tersendiri untuk dapat dihormati dan dilindungi.

Artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam “*the European Convention on Human Right*” menyatakan :

“...*applies not only to the content of information but also to the means of transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily interferes with the right to receive and impart information*”.⁴⁵

C.3. Perbandingan Praktik Negara - Negara

Internet telah menjadi ruang publik paling utama di abad ke-21, bahkan telah menjadi tempat bertemu bagi seluruh warga dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, Internet sudah menjadi

⁴⁵

The European Convention on Human Rights dalam Jimly Asshiddiqie, *Op.cit.*

barang yang umum bagi masyarakat yang masih dikategorikan negara berkembang. Hampir setiap lapisan masyarakat kota maupun desa, tua dan muda sudah mengenal internet.

Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Indonesia memicu berkembang pesatnya internet. Data KAM World menunjukkan bahwa kesejahteraan dan Human Development Indeks Indonesia lebih baik dibandingkan negara China dan Mesir.⁴⁶ Orang semakin sering menyuarakan pendapatnya melalui internet.

Indonesia merupakan komunitas Facebook terbesar kedua di dunia, dan pengguna ketiga terbesar untuk Twitter, dan juga “rumah” bagi jutaan blog dengan segala macam topik: fotografi, politik, agama, olahraga, dan fesyen yang merupakan topik-topik umum yang dibaca dan ditulis. Oleh sebab itu Indonesia tidak mengenal jenis kelamin, agama, etnis atau latar belakang ekonomi untuk memiliki akses Internet secara terbuka yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi, mengeluarkan pendapat, dan berkumpul bersama-sama secara online. Berbagai aksi-aksi sipil dilakukan melalui Internet untuk menyatakan kebebasan berbicara dan berkespresi, “Koin untuk Prita” misalnya, menjadi contoh dahsyatnya Internet. Melalui situs jejaring sosial masyarakat membela hak kebebasan berbicara

⁴⁶ <http://info.worldbank.org/etools>.

dari Prita. Dengan akses internet, masyarakat dari seluruh dunia setiap hari bertemu dan saling berhubungan lewat Internet untuk melihat berita dan bertukar informasi tentang apa yang terjadi di dunia atau untuk menjamin agar suara mereka didengar.

Lewat berbagai dialog ini, baik secara *online* atau percakapan langsung, berbagai dimensi baru dalam perdebatan yang telah kita lakukan selama berabad-abad mulai muncul, seperti: cara-cara memerintah yang terbaik, cara-cara untuk menegakkan keadilan, cara-cara untuk meraih kemakmuran dan cara-cara menciptakan kondisi-kondisi yang mendukung pembangunan jangka panjang, baik di dalam maupun di luar negeri kita. Keterhubungan yang muncul di era digital telah menciptakan dorongan baru mencari solusi bagi berbagai isu-isu lama tersebut. Untuk itu, pemerintah pemerintah dunia saat ini harus mengambil keputusan-keputusan sulit yang akan menentukan masa depan Internet. Bukan rahasia lagi bahwa “keamanan” sering dijadikan pembenaran untuk menghancurkan kebebasan Internet.

Frank La Rue melaporkan banyaknya pembungkaman yang dilakukan aparat Pemerintahan di China dan Mesir. Aparat menangkap para blogger, yang mencampuri kegiatan warganya, dan yang membatasi atau menutup akses ke informasi dengan alasan menjaga keamanan tidaklah dibenarkan. Membungkam

gagasan tidak akan membuat gagasan itu hilang. Masalah transparansi dan kerahasiaan merupakan hal yang penting. Kita tidak ingin kasus Snowden, pengungkap kebocoran data rahasia Amerika terjadi di Indonesia. Pemerintah harus menjaga kerahasiaan karena mereka melayani kepentingan masyarakat.

Akhir-akhir ini juga mengemuka persoalan baru di tengah-tengah kita, yang sedikit banyak mengganggu pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Ada upaya dari beberapa kelompok di masyarakat untuk melakukan persekusi terhadap praktik kebebasan berekspresi kelompok lain, dikarenakan perbedaan pandangan.

C.4. Pengaturan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Pada level negara, juga muncul kecenderungan penciptaan kebijakan yang justru menitikberatkan pada pembatasan kebebasan berekspresi. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan munculnya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang materinya memiliki dimensi pembatasan yang lebih besar daripada dimensi perlindungannya.

Hukum Indonesia juga masih belum menjamin kebebasan berekspresi secara penuh karena masih berlakunya produk

hukum lama yang menggunakan pendekatan lama, misalnya ketentuan mengenai pencemaran nama baik sebagai delik pidana dengan ancaman pidana penjara. Tak hanya mempertahankan delik pidana yang ada di KUHP, malah menambahkan pula dalam sejumlah regulasi baru, misalnya dalam UU ITE.

Walaupun melalui UU No.9 Tahun 1998 masyarakat telah memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum tapi *platform* yang ada diatur secara limitatif dan tidak terkait sama sekali dengan kebebasan berekspresi di media digital.

Kedepan tantangannya tentu akan semakin berat, perlindungan hak atas kebebasan berekspresi tidak lagi sekadar dihadapkan pada ekspresi konvensional, seperti hak atas informasi, kebebasan akademik, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, demonstrasi damai, dan spesies-spesies ekspresi lainnya, tetapi juga genus baru yang terkait dengan penggunaan teknologi internet. Populasi penduduk yang lebih dari 250 juta orang, menempatkan Indonesia pada posisi 10 besar pengguna internet di dunia. Data yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menyebutkan sampai dengan akhir tahun 2015 pengguna internet di Indonesia telah mencapai 88 juta pengguna, naik dibandingkan tahun 2011 yang jumlahnya 55 juta. Ini tentu pertumbuhan yang luar biasa besar, dibandingkan

situasi tahun 1998, yang baru mencapai angka setengah juta. Dilihat peringkat statistiknya di dunia, tahun 2015, jumlah pengguna internet di Indonesia berada pada 8 terbesar dunia dan terbesar ke 4 di Asia. Selain itu, para pengguna internet Indonesia juga mayoritas pengguna aktif media sosial seperti blog, facebook dan twitter. Ini bisa dilihat dari banyaknya akun aktif sejumlah media sosial tersebut.

Di Indonesia, kebebasan berekspresi telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam :

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

- a) Pasal 28 menyatakan : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- b) Pasal 28 E ayat (2) : “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
- c) Pasal 28 E ayat (3) : “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
- d) Pasal 28 F : “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.“

2) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, pengertian tentang “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, (Pasal 1).

3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”

4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Dalam Undang-Undang ini tidak diatur lebih lanjut mengenai hak-hak sipil dan politik yang ada di Indonesia, sebab Undang-Undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik juga merupakan isi dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala.⁴⁷ Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴⁸ Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.⁴⁹

⁴⁷ Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press. Hlm.23

⁴⁸ *Ibid*, hlm.6

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm.33

Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, sistematika peraturan perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁵⁰ Penelitian ini memfokuskan diri pada studi kepustakaan dan doktrin-doktrin hukum yaitu pandangan atau ajaran-ajaran para ahli hukum mengenai bidang studi yang dikaji, yakni berkaitan dengan hak perlindungan kebebasan berekspresi melalui media digital yang dimiliki oleh seseorang. Doktrin hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah doktrin hukum progresif, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum progresif merupakan hukum yang memiliki atau memuat rasa keadilan yang diharapkan. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk mengetahui pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital.

B. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan⁵¹ Sebagai suatu penelitian yang bersifat preskriptif, penelitian hukum ditujukan untuk mendapatkan saran-

⁵⁰ Soejono Soekanto, *Op.cit.* hlm.51

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm.22

saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan⁵² Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan preskripsi dan terapan mengenai perlindungan hukum atas kebebasan berekspresi melalui media digital.

C. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pada penelitian ini hanya digunakan pendekatan dari sisi undang-undang (*statute approach*), dengan menelaah semua legislasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji, yakni tentang perlindungan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut Hukum Internasional dan penerapannya di Indonesia.

D. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: ⁵³

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuka;

⁵² Soejono Soekanto, *Op.cit.* hlm.10

⁵³ *Ibid*, hlm.28

- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu;
- c. Data sekunder tidak terikat/dibatasi oleh waktu dan tempat.

Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, dan dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan antara lain :

- a. Buku-buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pandangan klasik para sarjana;
- b. Buku-buku teks tentang Komunikasi Digital dan Media Massa
- c. Jurnal-jurnal hukum yang berisi tentang hak asasi manusia;
- d. Peraturan perundang-undangan yang terkait tentang hak asasi manusia atau berkenaan dengan perlindungan kebebasan berekspresi;
- e. Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan perlindungannya, dan;
- f. Artikel atau tulisan-tulisan tentang kebebasan berekspresi dan perlindungannya, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Sumber Data

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Jadi untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus

memberikan preskripsi mengenai apa seyogianya atas isu yang diajukan, diperlukan sumber-sumber penelitian⁵⁴ Sumber-sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber-sumber penelitian yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku, teks, dokumen-dokumen, jurnal hukum, tulisan-tulisan para ahli di bidang hukum nasional maupun internasional yang didapat dari studi kepustakaan.

⁵⁴

Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm.141

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap dalam hal dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.⁵⁵

Mengingat jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa jenis data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka, maka teknik pengumpulan data yang tepat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi :

- a. Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak kebebasan berekspresi. Dimulai dengan penelitian terhadap ketentuan tentang berlakunya

⁵⁵ Soejono Soekanto, *Op.cit.* hlm.21

asas-asas hukum, UUD NKRI Tahun 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Kovenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Identifikasi norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan kebebasan menyatakan pendapat seseorang dihubungkan dengan perlindungan kebebasan berekspresi melalui media digital.
- c. Mengkaji tentang doktrin-doktrin hukum yang diperoleh melalui buku-buku hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak kebebasan berpendapat, serta buku-buku lainnya yang komprehensif dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik interpretasi atau penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkapkan di dalam undang-undang. Ia menyatakan "*Dieses geschieht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des Gesetzgebers versetzt und diese Tätigkeit in sich kuntslich wiederholt, also das Gesetz in ihrem Denken von Neuem entstehen laszt*"⁵⁶

Sedangkan Sudikno mengatakan bahwa Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu⁵⁷ Penafsiran atau interpretasi yang dikenal dalam ilmu hukum antara lain : interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi teologi atau sosiologi, interpretasi historis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis. Di dalam beberapa literatur dikenal juga interpretasi autentik. Bahkan interpretasi gramatikal dan interpretasi autentik dapat dimasukkan ke dalam interpretasi sistematis. Dalam penelitian ini peneliti tidak hanya menggunakan satu interpretasi, beberapa interpretasi yang digunakan oleh peneliti yaitu interpretasi gramatikal, yaitu cara penafsiran atau penjelasan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut

⁵⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm.106

⁵⁷ Sudikno Mertokusumo, Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.169

bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selanjutnya interpretasi autentik, yakni penjelasan yang diberikan oleh undang-undang dan terdapat dalam teks undang-undang.⁵⁸

Selain itu peneliti juga menggunakan jenis interpretasi sistematis yang menurut P.W.C. Akkerman adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan di antara aturan dalam suatu undang-undang yang saling bergantung.⁵⁹ Dalam interpretasi sistematis ini hubungan tidak hanya dilihat secara teknis, melainkan juga dilihat asas yang melandasinya. Landasan pemikiran interpretasi sistematis adalah undang-undang merupakan suatu kesatuan dan tidak satu pun ketentuan di dalam undang-undang merupakan aturan yang berdiri sendiri.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.170

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm.112

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital menurut Hukum Internasional

Seperti yang penulis telah ketengahkan pada Bab II, Kebebasan berekspresi memiliki dimensi politik, bahwa kebebasan ini dianggap sebagai elemen esensial bagi keikutsertaan warga dalam kehidupan politik dan juga mendorong gagasan kritis dan perdebatan tentang kehidupan politik bahkan sampai soal kemenangan militer.⁶⁰ Kaitan kebebasan berekspresi dengan demokrasi kemudian diakui dalam hukum internasional hak asasi manusia yang menyatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan pra-syarat bagi perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang pada akhirnya sangat esensial bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi juga menjadi pintu bagi dinikmatinya kebebasan berkumpul, berserikat dan pelaksanaan hak untuk memilih.⁶¹

⁶⁰ Vincenzo Zeno-Zencovich, *Freedom of Expression: A Critical and Comparative Analysis*, (New York: Routledge-Cavendish, 2008), hal. 1.

⁶¹ CCPR/C/CG/34, *Article 19: Freedom of Opinion and Expression*, Human Rights Committee, 102nd session, Geneva, 11-29 July 2011, paragraph 3-4.

Selaras dengan itu, dalam laporan tahun 2010, Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue mengatakan, kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, yang bisa mengembangkan dan mengekspresikan opini mereka dengan cara yang menurut mereka tepat.

Kebebasan berekspresi menurut La Rue bisa dilihat dari dua cara, pertama hak untuk mengakses informasi, dan kedua hak mengekspresikan diri melalui medium apapun. Selain itu, La Rue juga menjelaskan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat harus dilihat sebagai instrumen kunci dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang lain dan juga penting sebagai alat untuk mendorong pemberantasan impunitas dan korupsi.⁶²

Pondasi utama dalam menentukan batasan konsep dan cakupan jaminan hak atas kebebasan berekspresi mengemuka di dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tahun 1948, yang menegaskan:

“....Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi

⁶² A/HRC/14/23.

dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah...”

Ketentuan tersebut selanjutnya dielaborasi dan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, yang secara detail dan rigid merumuskannya sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk mengungkapkan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun, tanpa memperhatikan medianya, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya, sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak yang diatur dalam pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu hak tersebut dapat dikenai pembatasan tertentu, namun pembatasan tersebut hanya diperbolehkan apabila diatur menurut hukum dan dibutuhkan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan/ atau melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Komite Hak Asasi Manusia menekankan Pasal 19 paragraf dua di atas, pada dasarnya adalah melindungi semua bentuk gagasan

subjektif dan opini yang dapat diberikan/sebarkan kepada orang lain.⁶³ Sementara dalam paragraf satu Pasal 19 Kovenan, kebebasan berpendapat dikatakan sebagai urusan pribadi yang terkait dengan alam pemikiran yang sifatnya mutlak, tak boleh dibatasi oleh hukum atau kekuatan lainnya. Sesungguhnya hak untuk berpendapat tumpang tindih dengan kebebasan berpikir, yang dijamin Pasal 18. Kebebasan berpikir berkontribusi dalam kebebasan beropini, dimana pendapat adalah hasil dari proses pemikiran.⁶⁴

Mengenai cakupan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana ditegaskan dalam Kovenan, Komentar Umum No. 34 menyatakan:

“... Semua bentuk opini dilindungi, termasuk pendapat yang bersifat politik, ilmiah, sejarah, moral atau agama ...Pelecehan, intimidasi atau stigmatisasi seseorang, termasuk penangkapan, penahanan, mengadili atau memenjarakan karena alasan pendapat mereka, merupakan pelanggaran Pasal 19 ayat (1)”⁶⁵

“...melindungi semua bentuk ekspresi dan cara penyebarannya. Bentuk-bentuk tersebut termasuk lisan, tulisan dan bahasa simbol serta ekspresi non-verbal semacam gambar dan bentuk-bentuk seni. Alat ekspresi termasuk buku, surat kabar, panflet, poster, banner, pakaian serta submisi hukum. Dalam hal ini juga termasuk semua bentuk audio visual juga ekspresi elektronik dan bentuk-bentuk internet...”⁶⁶

⁶³ Manfred Nowak, *U.N.Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary*, 2nd revised edition, (Strasbourg: N.P. Engel, Publisher, 2005), hal. 444.

⁶⁴ *Ibid*, hal. 441.

⁶⁵ CCPR/C/GC/34, *Article 19: Freedom of Opinion and Expression, Human Rights Committee*, 102nd session, 11-29 July 2011, paragraph 9. Lihat di <http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>.

⁶⁶ *Ibid*, Paragraf 12

Selain Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yang lain juga memberikan penegasan perihal penjaminan hakatas kebebasan berekspresi dan berpendapat, yang antara lain sebagai berikut:

1. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 1965), ketentuan Pasal 5 konvensi ini menegaskan kewajiban-kewajiban mendasar negara-negara pihak pada Konvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk kewajiban di dalam Pasal 5 (d) (viii) untuk menjamin praktik hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi.
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* 1966). Meski tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak atas kebebasan berpendapat atau berekspresi, namun hak asasi manusia adalah universal, tak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait. Ini berarti bahwa penikmatan hakatas kebebasan berpendapat dan berekspresi tak terpisahkan, saling tergantung dan saling terkait dengan penikmatan hak ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai contoh, konservasi budaya mencakup

“penghormatan atas kebebasan individu untuk memilih, mengekspresikan dan mengembangkan budayanya”.⁶⁷

3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979), dalam ketentuan Pasal 3 ditegaskan mengenai kewajiban negara-negara pihak untuk mengambil semua langkah yang tepat, termasuk dengan membuat semua peraturan perundang-undangan di semua bidang, khususnya dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak asasi dan kebebasan-kebebasan dasar atas dasar persamaan dengan laki-laki.
4. Konvensi tentang Hak-hak Anak (1989), disebutkan dalam Pasal 13 bahwa anak berhak atas kebebasan berekspresi dengan pembatasan. Kemudian di Pasal 17 ditegaskan bahwa anak memiliki akses terhadap informasi dan materi dari beraneka ragam sumber nasional maupun internasional khususnya informasi materi yang dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan sosial, spiritual dan moral serta kesehatan fisik dan mental anak.

Sejumlah instrumen hak asasi manusia regional yang memberikan penegasan mengenai jaminan perlindungan terhadap

⁶⁷ R. P. Claude and B. H. Weston (eds.) “Human Rights in the World Community: Issues and Action” (University of Pennsylvania Press, 3rd edition, 2006), hal. 230.

hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yaitu sebagai berikut:

1. Piagam Afrika tentang Hak Asasi Orang dan Manusia (*African Charter on Human and People's Rights*)⁶⁸ Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi terdapat di dalam Pasal 9, berbeda dengan perlindungan diberikan oleh traktat-traktat yang lain, ketentuan Pasal 9 piagam tidak memasukan “hak untuk menerima ide atau untuk memberikan informasi”. Selain itu, ketentuan Pasal 9 juga tidak mengatur pembatasan terhadap hak-hak berekspresi. Namun, kebebasan ini harus tetap tunduk pada pembatasan umum yang terdapat dalam Pasal 27-29, yang satu sama lain saling berhubungan, yaitu “menghormati hak-hak orang lain, keamanan kolektif, moralitas dan kepentingan umum”.
2. Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa (*European Convention on Human rights*)⁶⁹ Dewan Eropa telah membangun secara luas lembaga hukum, jurisprudensi dan peraturan-peraturan berkaitan dengan kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi dan hak-hak terkait kebebasan berkumpul dan berserikat. Pernyataan hukum paling penting berkaitan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi terdapat di dalam

⁶⁸ Lihat juga *Declaration of principles on freedom of expression in Africa*.

⁶⁹ Lihat juga *Amsterdam Recommendations, Freedom of the Media and the Internet*. Juga *Bishkek Declaration (Organization for Security and Co-operation in Europe)*.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar), selanjutnya disingkat Konvensi Eropa. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Konvensi. Paragraf 1 Pasal 10 Konvensi Eropa menyatakan bahwa “*setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi*”. Hak ini mencakup kebebasan untuk memiliki, menerima dan menyebarluaskan informasi dan pikiran tanpa adanya campur tangan dari penguasa. Ketentuan Pasal 10 Konvensi Eropa ini memiliki pengaruh terhadap hukum yang berlaku bagi masyarakat Eropa terikat untuk mempertimbangkan Konvensi Eropa dalam melaksanakan kekuasaannya, dan Pengadilan Eropa telah secara konsisten mempertahankan bahwa hak asasi manusia fundamental, terutama yang dinyatakan dalam Konvensi Eropa, “dilindungi dalam prinsip-prinsip umum masyarakat hukum”.

3. Konvensi Hak Asasi Manusi Amerika (*American Convention on Human Rights*) ⁷⁰Ketentuan Pasal 13 Konvensi menyatakan perlindungan yang tegas, dan pembatasan yang dibolehkan terhadap kebebasan berekspresi. Ayat 1 berisi ketentuan yang hampir sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Kovenan Internasional. Walaupun ketentuan ayat 1 ini tidak secara

⁷⁰ Lihat juga *Declaration on principle of freedom of expression*.

husus menyatakan bahwa “setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa adanya campur tangan”, perlindungan ini dianggap mutlak. Selanjutnya ayat 2 secara eksplisit melarang setiap sensor”. Ayat 3 merupakan ketentuan yang belum ada sebelumnya di antara traktat hak asasi manusia, yaitu secara tegas melarang cara tidak langsung dalam pembatasan terhadap hak berekspresi, seperti pembagian yang tidak adil koran atau frekuensi siaran, dan melarang beberapa cara oleh orang biasa yang bertindak seperti pemerintah. Ketentuan ini menentukan kewajiban yang tegas bagi pemerintah untuk membatasi tindakan individu yang akan mengganggu pelaksanaan hak untuk mencari, menerima dan menyebarluaskan informasi dan pikiran. Ayat 4 mengizinkan penyensoran pada “pertunjukan umum” yang bertujuan untuk melindungi moral anak-anak dan remaja, dan hanya dilakukan apabila berdasarkan undang-undang. Ayat 5 mengharuskan negara pihak untuk melarang propaganda perang dan hasutan kebencian terhadap bangsa, ras dan agama. Ketentuan Pasal 14 memerintahkan kepada negara pihak untuk menjamin bahwa setiap orang yang mengalami kerugian akibat “pernyataan yang tidak akurat dan menyerang” yang disiarkan oleh media massa memiliki hak untuk menjawab atau mengoreksi dengan menggunakan media massa tersebut. Selanjutnya Pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa setiap

organ komunikasi massa harus memiliki orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kehormatan atau reputasi. Pengadilan Inter-Amerika, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan bahwa Pasal 14 mengharuskan negara pihak untuk melakukan beberapa tindakan legislatif atau tindakan lain yang diperlukan untuk memberikan dampak terhadap “hak jawab”.

Merujuk pada batasan instrumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, kebebasan berekspresi setidaknya mencakup tiga jenis ekspresi, yaitu: a. kebebasan untuk mencari informasi; b. kebebasan untuk menerima informasi; c. kebebasan untuk memberi informasi termasuk di dalamnya menyatakan pendapat. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua informasi atau ide apapun termasuk dalam hal ini fakta, komentar kritis, atau pun ide/gagasan. Jadi yang relatif netral, iklan komersial, seni, komentar yang lebih bersifat politis/kritis serta pornografi, dll. Kebebasan berekspresi juga melindungi semua bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, cetak, media seni serta media apa pun yang menjadi pilihan seseorang/ perlindungan tersebut ditujukan pada semua bentuk media: radio, televisi, film, musik, grafis, fotografi, media seni, dll, termasuk kebebasan untuk melintas batas negara.

Kebebasan berekspresi dipahami sebagai sebuah kebebasan yang bersifat dinamis. Beberapa titik penting muncul, di mana batas itu, siapa yang menetapkan dan apa konsekuensi yang harus

ditanggung bila pembatasan itu tidak dilaksanakan, juga tentunya landasan apa yang paling sah untuk menetapkan pembatasan.⁷¹

Soal ini, ratusan tahun lalu, Mill telah memberikan kata kunci, *'instigation'* atau penghasutan. Saat itu Mill mengakui potensi bahaya dalam kebebasan kata-kata. Mill kurang lebih mengatakan *"even opinions lose their immunity when the circumstances in which they are expressed are such as to constitute their expression a positive instigation to some mischievous act"*.⁷² Dengan demikian, pembatasan kebebasan adalah valid apabila kebebasan berekspresi merangsang dilakukannya tindakan kekerasan yang membahayakan bagi jiwa.

Kovenan sendiri mengakui bahwa kebebasan berekspresi menerbitkan "kewajiban dan tanggung jawab khusus". Oleh karena itu kebebasan berekspresi dikenai pembatasan yang diberi syarat harus ditetapkan berdasar hukum dan sesuai dengan kebutuhan dengan alasan "menghormati hak atau nama baik orang lain" dan "melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat".⁷³ Selain itu, Kovenan juga sungguh-sungguh menghilangkan imunitas kebebasan berekspresi dalam propaganda merangsang perang juga segala tindakan yang menganjurkan

⁷¹ Lihat juga *Declaration on principle of freedom of expression*.

⁷² Lihat John Stuart Mill, *On Liberty, Chapter III, On Individuality, As One of the Element of Well Being*, 1859, dalam <http://www.utilitarianism.com/ol/three/html>

⁷³ Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan yang dinyatakan harus dilarang oleh hukum.⁷⁴

Pembatasan ini muncul dari tugas dan tanggung jawab khusus yang melekat pada pelaksanaan kebebasan tersebut. Dari pelbagai instrumen HAM internasional hanya ICCPR dan CRC yang berbicara tentang pembatasan ini. Terdapat tiga syarat yang ditetapkan dalam Pasal 18 dan 19 ICCPR yang harus terpenuhi sebelum pembatasan terhadap hak-hak kebebasan berekspresi dilakukan, yakni:

- (1) harus diatur menurut hukum;
- (2) harus untuk suatu tujuan yang sah/memiliki legitimasi;
- (3) harus dianggap perlu untuk dilakukan (proporsional).

Terkait dengan syarat yang ke-2, pembatasan hanya dapat dilakukan untuk tujuan “melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan orang lain”. (Pasal 18) atau untuk “menghormati hak dan reputasi orang lain atau untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat” (Pasal 19).

⁷⁴ Pasal 20 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Pembatasan dengan tujuan untuk “melindungi ketertiban umum” merupakan dasar yang sering kali digunakan oleh pemerintah untuk membatasi praktik kebebasan tersebut. Dalam pelbagai keputusan dan putusan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi internasional seperti Komite Hak Asasi Manusia dan juga Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, dijelaskan bahwa pembatasan dengan tujuan untuk melindungi ketertiban umum harus didasarkan pada dua hal, yakni “tuduhan-tuduhan yang konkrit tentang bagaimana pelaksanaan kebebasan berekspresi si tertuduh mengancam ketertiban umum” dan “bahwa pembatasan tersebut diperlukan untuk melindungi ketertiban umum”. Ini berarti bahwa ketertiban umum tidak secara otomatis terganggu hanya karena hukum mengatakan seperti itu tetapi karena terdapat keadaan-keadaan yang secara efektif menyerang atau mengancam ketertiban umum. Pemerintah harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip persamaan dan non-diskriminasi dalam menerjemahkan lingkup dari klausul pembatasan tersebut.

Dalam perkembangannya, prasyarat pembatasan ini kemudian diturunkan dalam batasan-batasan yang lebih detail seperti tercantum di dalam sejumlah prinsip hak asasi manusia internasional (*softlaw*). Prinsip-prinsip tersebut adalah Prinsip *Siracusa* dan Prinsip *Johannesburg*, yang mengemukakan pembatasan hak sebagai berikut ini:

Syarat	Keterangan
Diatur melalui UU	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan pada UU - Implementasi UU harus sejalan dengan Kovenan - Kovenan berlaku saat pembatasan dilakukan
Dalam suatu masyarakat yang demokratis	<ul style="list-style-type: none"> - Negara harus membuktikan pembatasan itu
Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman terhadap kesehatan pupolasi atau anggota populasi - Bertujuan khusus untuk mencegah penyakit atau luka atau menyediakan perawatan bagi yang sakit atau terluka
Moral Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Kewenangan melakukan diskresi - Dapat membuktikan bahwa pembatasan penting untuk menjaga penghormatan pada nilai-nilai fundamental masyarakat - Tidak menyimpangi prinsip non-diskriminasi
Keamanan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Bila terkait dengan eksistensi bangsa, integritas teritorial dan politik atau kemerdekaan - Tidak bisa diterapkan pada ancaman yang bersifat lokal atau ancaman yang relatif terisolasi terhadap hukum dan tata tertib - Tidak dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dalam upaya menekan oposisi dan perlawanan terhadap represi negara
Keamanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Ancaman terhadap keamanan, nyawa dan keutuhan fisik alam kerusakan serius atas kepemilikan - Tidak dapat diterapkan pada pembatasan yang kabur dan sewenang-wenang - Hanya bisa diterapkan bila terhadap perlindungan yang memadai dan mekanisme pemilihan yang efektif.
Hak dan Kewajiban dari pihak lain	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dapat dipergunakan untuk melindungi negara dan pejabat negara dari kritik dan opini publik - Bila terdapat konflik antar hak preferensi diberikan pada hak yang bersifat paling fundamental dan tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun (non-derogable right)

B. Penerapan Pengaturan Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital di Indonesia

UUD 1945 hasil amandemen kedua, yang disahkan pada 18 Agustus 2000 setidaknya memuat tiga ketentuan yang secara khusus dan eksplisit memberikan jaminan perlindungan bagi kebebasan berekspresi di Indonesia. Ketiga pasal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Ketentuan	Jaminan HAM
Pasal 28	Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28 E (3)	Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28 F	Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain itu Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memuat perlindungan terhadap hak atas kebebasan berekspresi Pasal 23 UU No. 39 tahun 1999 menyatakan:⁷⁵

⁷⁵ Undang – Undang No.39 Tahun 1999

- (1) Setiap orang berhak untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.
- (2) Setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Indonesia juga telah mengesahkan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR*) memberikan jaminan tegas mengenai hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Negara juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memberikan jaminan perlindungan bagi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi. Perundangan tersebut, antara lain: (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; dan (3) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU Pers mengatur dan melindungi kegiatan jurnalistik. Pasal 4 UU No. 40 Tahun 1999 menyatakan secara tegas bahwa "*Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*". UU ini juga memberi jaminan bahwa "*terhadap pers nasional tidak dikenakan*

penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”. Selain itu, UU ini menjamin tiga kegiatan dalam lingkup kebebasan berekspresi yaitu kegiatan *“mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi”*. UU ini juga menjamin hak tolak wartawan dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.

Sementara isu yang menarik terkait dengan UU Penyiaran ialah mengenai topic keberagaman media, yang menjadi isu yang sangat penting bagi kebebasan berekspresi dalam hukum internasional. Isu ini mengemuka dan menjadi relevan oleh karena negara harus membuat cara untuk melindungi pengguna media termasuk kelompok minoritas agar dapat menerima gagasan dan informasi yang ada. Selain itu perkembangan media massa modern juga meminta negara agar mencegah adanya monopoli dan menjamin adanya keberagaman media.

Keberagaman media dalam hal ini dapat dilihat dari media penyiaran. UU Penyiaran menegaskan bahwa spektrum frekuensi pada dasarnya menjadi milik negara. Pasal ini juga mengatur sistem penyiaran nasional bahwa penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal. UU tentang Penyiaran juga melakukan pembahasan terhadap pemusatan kepemilikan media di tangan satu orang atau satu badan hukum.

Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) pada 18 Oktober 2011 mengajukan materi Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 34 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta agar ada penetapan tafsir atas ketentuan-ketentuan tersebut untuk menjamin pelaksanaannya. Permohonan tersebut ditolak oleh MK, dimana MK mempertimbangkan bahwa pembatasan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Penyiaran dan pemaknaannya dalam Peraturan Pemerintah telah sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Kalau pun dalam tataran praktik terjadi penyimpangan, maka hal itu adalah persoalan implementasi norma dan bukan masalah konstitusionalitas.⁷⁶

Sedangkan UU Keterbukaan Informasi Publik memberikan perlindungan khususnya yang terkait dengan kebebasan berekspresi dalam jenis kebebasan “mencari” informasi utamanya. UU ini mengatur dan melindungi salah satu aspek penting dari kebebasan berekspresi, yaitu kebebasan untuk mencari informasi dengan memuat aspek-aspek penting dari kebebasan mencari informasi (sebagaimana dapat dilihat dala tabel 2 di bawah ini). Namun

⁷⁶ Lihat Putusan MK No. 78/PUU-IX/2011, dapat diakses di http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_78%20PUU%202011-telah%20baca%203%20Okt%202012.pdf.

demikian, UU ini melindungi kebebasan dalam mencari satu jenis informasi saja, yaitu yang menyangkut informasi publik.

UU KIP telah memuat beberapa aspek penting yaitu soal prinsip dasar bahwa informasi pada dasarnya bersifat terbuka dan pengecualian atasnya bersifat ketat dan terbatas, serta mengenai mekanisme untuk memperoleh informasi. UU KIP ini dapat dipandang sebagai penjamin akses atas informasi dan sebagai pelaksanaan atas ketentuan dalam Komentar Umum No. 34,⁷⁷ yang dikeluarkan oleh Komite Hak Asasi Manusia, di mana Negara Pihak diminta untuk menyediakan mekanisme dan prosedur untuk mengakses informasi termasuk melalui jalan legislasi dan jaminan untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, murah dan mudah. UU KIP juga sudah menjamin bahwa setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Selain memuat perlindungan hak asasi manusia, Konstitusi Indonesia juga mengatur pembatasan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 J sebagai berikut:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

⁷⁷ Komentar Umum merupakan interpretasi otoritatif yang berlaku seperti panduan, berisi cakupan, karakteristik dan cara membaca isi konvensi. Dikeluarkan oleh Badan atau Komite PBB yang melindungi bidang-bidang terkait. Posisi Komentar Umum adalah *soft laws* yang tidak mengikat secara hukum (*legally binding*).

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Ketentuan tentang pembatasan juga diatur dalam ketentuan Pasal 70 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan:

“...Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis...”

Sementara itu ketentuan Pasal 73 menyatakan:

“...Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan Undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa...”

Dengan pengaturan yang demikian, bisa dilihat perbedaan klausul yang dipakai sebagai dasar pembatasan antara hukum internasional HAM dengan Konstitusi dan UU No. 39 Tahun 1999 sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Pembatasan Hak di dalam
Hukum Nasional dan Hukum Internasional**

UUD 1945	UU 39/1999	ICCPR
Ditetapkan dengan undang-undang	Ditetapkan undang-undang	Ditetapkan oleh hukum/undang-undang
Dalam suatu masyarakat demokratis	Dalam suatu masyarakat demokratis	Dalam suatu masyarakat demokratis
1. Pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain 2. Moral 3. Nilai-nilai agama 4. Keamanan 5. Ketertiban Umum	1. Pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain 2. Pertimbangan moral, keamanan, 3. Ketertiban umum 4. Kesusilaan 5. Kepentingan bangsa	1. Ketertiban umum 2. Kesehatan public 3. Moral public 4. Keamanan nasional dan keamanan public 5. Hak dan kebebasan orang lain 6. Hak atau reputasi orang lain 7. Kepentingan kehidupan pribadi pihak lain yang berkaitan dengan pembatasan terhadap pers dan public pada pengadilan

Perbedaan klausul pembatas dan penerapannya:

- a. Hukum nasional memasukkan nilai agama, kesusilaan dan kepentingan bangsa.
- b. Hukum internasional memasukkan kesehatan publik, keamanan publik, hak dan reputasi orang lain serta kepentingan kehidupan pribadi orang lain.

Klausul pembatasan hak pada Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik diterapkan tidak secara umum namun penerapannya diatur hak per hak. Sementara pada UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 diterapkan secara umum pada semua hak.

Pembatasan kebebasan berekspresi juga mengemuka di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik, dengan adanya bentuk informasi yang dikecualikan. Ada dua titik penting yang harus diperhatikan terkait dengan pembatasan informasi dalam undang-undang ini. pertama, UU ini membatasi jenis informasi publik yang dapat diakses. Kedua, UU ini menggunakan dasar “kepatutan dan kepentingan umum” sebagai dasar alasan dalam pembatasan hak. Dasar alasan “kepatutan dan kepentingan umum” justru tidak ada dalam Konstitusi maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 2 ayat (2) UU KIP sendiri menyatakan bahwa “Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas”. Dengan demikian, pengecualian informasi didasarkan pada dua dasar pembatasan dan dilakukan secara ketat dan terbatas.

Selain pembatasan melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, di Indonesia hak atas informasi juga dibatasi menggunakan instrument UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Seluruh informasi yang masuk kategori rahasia intelijen, menjadi bagian dari rahasia

negara yang ditutup aksesnya.⁷⁸ Ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Intelijen Negara mendefinisikan rahasia intelijen sebagai,

“...Informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak...”

Pengertian ini sangat luas cakupannya sehingga sangat membatasi hak publik atas informasi, karena keseluruhan informasi yang terkait intelijen negara bisa diklaim rahasia. Dalam konteks UU Intelijen Negara, alasan keamanan nasional menjadi basis argument untuk melakukan pembatasan informasi. Namun demikian dalam penerapannya, kategorisasi mengenai rahasia intelijen, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Intelijen Negara, dalam pembatasannya bisa dikatakan keluar dari prinsip *necessity* dan *proportionality*.

Tidak selarasnya mekanisme pembatasan hak asasi manusia antara instrument internasional hukum hak asasi manusia dengan hukum nasional kian ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dituangkan di dalam pertimbangan hukum putusan No. 132/PPU-VII/2009. Di dalam putusan tersebut MK berpendapat bahwa perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945

⁷⁸

Disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 25 ayat (1) UU Intelijen Negara.

keberlakuannya dapat dibatasi Pasal 28J UUD 1945 tersebut. Selain itu menurut MK, berdasarkan penafsiran sistematis (*systematische interpretatite*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28 UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945.⁷⁹

Masalah utama yang mengemuka dalam pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi adalah masih adanya sejumlah kebijakan, dalam bentuk perundang-undangan yang materinya membatasi kebebasan berekspresi dengan semena-mena atau setidaknya seringkali disalahgunakan dalam penerapannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) terutama BAB XVI tentang Penghinaan, khususnya Pasal 207, Pasal 208, Pasal 310 ayat (1), Pasal 310 ayat (2), Pasal 311 ayat (1), Pasal 315 tentang penghinaan ringan, dan Pasal 316 tentang penambahan hukum jika yang dihina adalah pejabat negara.
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama Bab VII tentang Perbuatan yang dilarang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29.
3. UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terutama pada beberapa pasalnya yang mengatur tentang definisi dan cakupan

⁷⁹ Selengkapnya lihat Putusan No. 231/PUU-VII/2009, hal. 31. Pendapat tersebut kembali ditegaskan oleh MK di dalam Putusan No. 45/PUU-VIII/2010.

pornografi karena terlalu luas dan fleksibel sehingga mudah disalahgunakan. Hal ini sepertinya terumuskan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 43.

4. UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara terutama pada ketentuan yang mengatur tentang 'rahasia intelijen', khususnya pada Pasal 1 angka 6, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26, Pasal 44, dan Pasal 45.

Tidak hanya masalah penormaan, pada pelaksanaannya di lapangan juga masih banyak dijumpai kasus-kasus yang masuk kategori pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi, khususnya yang merupakan kelanjutan dari penerapan beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik di KUHP dalam praktiknya masih sering digunakan. Penggunaan pasal ini misalnya dalam kasus Risang Bima Wijaya, wartawan harian Radar Jogja, yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung pada Januari 2006 dan dihukum 6 bulan penjara, karena tulisannya dianggap mencemarkan nama baik salah seorang pemimpin media lokal di Yogyakarta. Pengadilan tingkat pertama, banding dan Mahkamah Agung menyatakan Risang telah melanggar Pasal 310 ayat (2) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Upaya peninjauan kembali diajukan Risang ke Mahkamah Agung juga ditolak, melalui

putusan MA No. 14 PK/Pid/2008, yang dikeluarkan pada 24 Juni 2009.⁸⁰

Kaitannya dengan pencemaran nama baik yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 ayat (3)), pada tahun 2009 sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia telah mengajukan *judicial review* ketentuan ini ke Mahkamah Konstitusi. Namun dalam putusannya MK menolak permohonan ini, salah satu pertimbangan yang dikemukakan MK adalah bahwa penghinaan yang telah diatur dalam KUHP (penghinaan *offline*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia siber (penghinaan *online*).

Dari beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, ada dua kasus hukum yang dapat dijadikan contoh terkait penggunaan ketentuan ini yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Prita Mulyasari tahun 2009 di Pengadilan Negeri Tangerang, yang ditahan setelah mengirimkan email berisikan keluhannya atas pelayanan sebuah rumah sakit swasta di Tangerang yang dianggapnya tidak sesuai dengan standar internasional Rumah Sakit tersebut, E-mail tersebut dikirimkannya

⁸⁰ Putusan yang dimaksud dapat dengan mudah diakses melalui url berikut: http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/_e4bdcd8de460ba3b5c6ac56de24a6f5d.

kepada beberapa rekannya dan kemudian diteruskan ke beberapa *mailinglist*.⁸¹

2. Kasus Diki Candra tahun 2011 di Pengadilan Negeri Tangerang yang dipenjara akibat membuat sebuah blog yang berisikan informasi mengenai hasil investigasi terhadap salah satu tokoh publik. Diki kemudian meminta bantuan orang lain untuk menutup blog tersebut, akan tetapi kasusnya tetap diteruskan dan dia dinyatakan bersalah serta dihukum 6 bulan penjara,⁸² dan (3) kasus Musni Umar tahun 2001 yang dilaporkan ke polisi setelah menulis di blognya mengenai dugaan penyalahgunaan dana oleh pejabat di salah satu sekolah, sampai saat ini kasusnya masih diproses.

Selain itu, tingginya tekanan kelompok intoleran menjadikan kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya, khususnya facebook dikriminalisasi. Kasus Alexander Aan yang mengaku seorang atheis dan membuat pernyataan "*God Does Not Exist*" atau "Tuhan tidak ada", di akun grup Facebook Atheis Minang awal 2012 dipidana dengan tuduhan telah Penistaan Agama dan menyebarkan kebencian melalui media elektronik. Hakim menyatakan Aan bersalah melanggar Pasal 28 (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

⁸¹ Lihat Putusan PN Tangerang No. 1269/PID.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009.

⁸² Lihat Putusan PN Tangerang No. 1190/Pid.B/2010/PN.TNG, tanggal 18 Februari 2011.

tentang penyebaran permusuhan dalam konteks agama dan dipidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.⁸³ Kasus serupa menimpa Mirza Alfath pada 2012, yang mengkritik pelaksanaan Hukum Syariah di Aceh, keberpihakannya kepada Israel, dan pemikirannya yang mengedepankan rasionalitas. Mirza dituduh melakukan penghinaan/penodaan agama Islam. Rumah Mirza sempat menjadi sasaran amuk massa dengan dilempari batu. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, mengadilinya dan meminta Mirza meminta maaf, bersyahadat dan mengulang pernikahannya. Sementara Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh Utara melarang Mirza untuk mengajar dan membimbing skripsi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ia juga dicopot dari jabatannya sebagai Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara di fakultasnya.

Kasus-kasus yang menggunakan pasal penyebaran kebencian dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memperlihatkan tujuan pasal tersebut salah sasaran. Pasal ini digunakan secara efektif untuk memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui dunia maya, sementara pernyataan-pernyataan yang diunggah maupun dikelola oleh kelompok intoleran tidak menjadi sasaran penerapan pasal ini.

Tidak hanya ancaman pidana akibat penggunaan internet dan media sosial internet, belakangan ini juga muncul

⁸³ Lihat Putusan PN Muaro No. 45/PID.B/2012/PN.MR, tanggal 14 Juni 2012.

praktik pembatasan dan penyaringan konten sewenang-wenang (*arbitrary blocking and filtering*) terhadap situs-situs tertentu dengan dalih mengundang muatan pornografi dan terorisme. Padahal pemerintah sendiri belum memiliki peraturan yang memadai sebagaimana diatur dalam Kovenan, untuk melakukan pembatasan dan pelarangan ekspresi di internet.

Selain itu, Indonesia juga tidak memiliki badan khusus yang independen untuk melakukan pembatasan dan penyaringan konten, dan selama ini aktivitas tersebut juga tidak dilakukan oleh pengadilan. Pemerintah bahkan menyerahkan pembatasan dan penyaringan konten kepada sektor swasta—termasuk penyedia layanan internet, sehingga praktiknya telah terjadi pembatasan dan penyaringan konten secara semena-mena. Akibatnya banyak situs yang kemudian menjadi korban dari kebijakan ini.

Merujuk pada laporan Frank La Rue, *UN Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion*, beberapa persoalan yang mengemuka dalam penggunaan teknologi internet, yang cenderung mengancam kebebasan berekspresi antara lain adalah:

1. Pemblokiran dan penyaringan konten semena-mena,
2. Kriminalisasi terhadap pengguna internet—pemindaan terhadap ekspresi yang sah;
3. Serangan dunia maya;

4. Pemutusan/penutupan akses dengan alasan HaKI;
5. Pengenaan tanggungjawab hukum pada perantara–penyedia layanan internet; dan
6. Kebocoran data pribadi pengguna, akibat tiadanya mekanisme perlindungan data yang memadai.⁸⁴

Bentuk-bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi lainnya antara lain terekam dengan adanya tindakan pembubaran terhadap aktivitas diskusi buku Irshad Manji pada Mei 2012 di Jakarta dan Yogyakarta. Bahkan di Yogyakarta, diskusi yang rencananya akan digelar di Universitas Gadjah Mada, sebagai sebuah institusi akademik juga batal dilaksanakan, akibat adanya tekanan dari massa intoleran. Aparat penegak hukum sendiri tidak menindaklanjuti laporan tentang adanya pembubaran paksa kegiatan diskusi tersebut dan mendiampkannya tanpa proses hukum. Pengekangan ekspresi lainnya adalah pelarangan terhadap penyelenggaraan Q-film festival yang dianggap mengampanyakan LGBT. Bahkan dalam kasus ini penyelenggaranya dilaporkan ke polisi oleh kelompok intoleran dengan tuduhan telah melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU Pornografi.

⁸⁴ Laporan selengkapnya dapat dengan mudah diakses melalui url berikut: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf.

Kasus lainnya yang mengemuka terkait dengan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi adalah masih tingginya kekerasan yang dialami oleh para jurnalis. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap jurnalis dan aktivitas jurnalis ini bermacam-macam, mulai dari sensor, serangan peretas web, pengusiran dan pelarangan liputan, perampasan dan pengrusakan alat jurnalistik, demonstrasi dan pengerahan massa, ancaman dan teror, hingga serangan fisik. Dalam catatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, selama periode Januari-November 2012 saja sedikitnya terjadi 51 kasus kekerasan yang dialami oleh jurnalis, kasus yang paling banyak terjadi berupa serangan fisik (17 kasus), ancaman dan teror (13 kasus), serta perampasan dan perusakan alat (9 kasus). Pelaku kekerasan tertinggi terhadap jurnalis adalah aparat pemerintah (12 kasus), kedua pelaku paling banyak ditempati polisi (10 kasus), dan ketiga paling banyak dilakukan oleh TNI (8 kasus).

Kasus pembunuhan terhadap jurnalis juga masih terjadi, misalnya kasus yang dialami oleh Prabangsa, jurnalis Radar Bali yang ditemukan tewas pada 11 Februari 2009 di pantai Padang Bai, Karangasem, Bali. Awalnya, kasus itu dianggap sebagai kasus pembunuhan biasa yang tidak terkait dengan profesi Prabangsa sebagai jurnalis. Setelah tiga bulan terkatung-katung, dorongan dari berbagai pihak membuat polisi menemukan fakta bahwa pembunuhan itu terkait pemberitaan dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten

Bangli. Namun sayangnya, tidak semua kasus pembunuhan terhadap jurnalis bisa diungkap. Dalam catatan AJI Indonesia, sampai tahun 2012 setidaknya masih terdapat 8 kasus pembunuhan terhadap jurnalis yang pelakunya belum dibawa ke pengadilan atau meskipun dibawa ke proses hukum, para terdakwaanya dibebaskan karena tidak seriusnya proses tersebut. Impunitas terhadap kasus pembunuhan jurnalis antara lain terjadi pada kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alais Udin, jurnalis Harian Bernas Yogyakarta. Diserang orang tidak dikenal pada 13 Agustus 1996, meninggal pada 16 Agustus 1996.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital telah dengan jelas dan sangat rigid di atur dalam berbagai instrumen Hukum Internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta berbagai ketentuan hukum regional.
2. Penerapan Regulasi mengenai Kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesiapun telah dilakukan oleh Pemerintah melalui Ratifikasi *ICCPR* dan UU HAM No.39 Tahun 1999 serta mengatur secara khusus Informasi dan Transaksi Elektronik melalui UU No.11 Tahun 2008. Namun dalam aplikasinya masih terdapat banyak tantangan serta masalah terkait intoleransi dari warga masyarakat, kebijakan politik yang tidak demokratis serta berbagai tekanan dari pihak – pihak yang tidak menyukai konsep HAM.

B. Saran

1. Perlunya pengawasan yang lebih ketat melalui koordinasi PBB dan negara-negara terkait penegakkan HAM khususnya kebebasan berekspresi

2. Adanya jaminan kebebasan berinteraksi melalui media digital tanpa di batasi oleh kebijakan-kebijakan politik yang tidak demokratis
3. Terus dilakukan advokasi mengenai pentingnya penegakkan HAM dan sikap toleran masyarakat terhadap kebebasan berekspresi setiap orang terutama melalui *platform* digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Labib.2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- A. Mansyur Effendi.2005. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) danProses Dinamika Penyusunan Hukum HAM (HAKHAM)*.Jakarta: Ghalia Indonesia. Jakarta: Rafika Aditama.
- Anton. M. Moeliono,.1989.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD*. Jakarta: Ghalia Pustaka.
- Darwin Prinst.2001.*Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*.Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Dikdik.M. Arief Mansur dan Elikatris Gultom.2005.*Cyber Law Aspek Hukum TeknologiInformasi*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Ifdhal Kasim.2001. *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM.
- Jimly Asshiddiqie.2006.*Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Parati Politik danMahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Johnny Ibrahim.2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Krisna Harahap.2003. *HAM dan Upaya Penegakannya di Indonesia*. Bandung: Grafiti.
- Kuntjoro Probopranoto. 1979. *Hak-Hak Azasi Manusia dan Pancasila*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lani Sidharta.1996. *INTERNET Informasi Bebas Hambatan 2*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Leah Levin.1987. *Hak-Hak Asasi Manusia Tanya Jawab*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

- Miriam Budiardjo.1996. *Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Pratiwi Utami.2009. *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008*.Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisir.
- Rozali Abdulah dan Syamsir.2002.*Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *ILMU HUKUM*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Shad Saleem Furuqui.1998.*Apakah Hak-Hak Asasi Manusia Itu?Beberapa Penjelasan Tentang Berbagai Konsep dan Sudut Pandang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Press.
- Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Statu TujuanSingkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo, 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Todung Mulya Lubis. 1993. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Dunia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ahmad M.Ramli. 2005. *Cyber Law dan HAKI*. Bandung : Aditama
- Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama.
- Budhi Irawan. 2005. *Jaringan Komputer*. Bandung : Graha Ilmu.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta : Rajawali Press.
- Wina Armada. 1989. *Wajah Hukum Pidana Pers*. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Larry Alexander. *Is there a right to freedom of expression*.New York: Cambridge University Press. 2005.

Makalah

Djaka Wahyu Winarno.2007. "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*". *Makalah*.Disampaikan pada Diskusi Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UNS dan Bagian Hukum Dan HAM Sekretariat Daerah Kota Surakarta, pada tanggal 16 November 2007 di Surakarta.

Kanwil Depkumham Jawa Tengah.2007."*Bunga Rampai Hak Asasi Manusia*".*Makalah*.Disampaikan pada Acara Sosialisasi HAM, pada tanggal 16 November 2007 di Surakarta.

Majalah atau Jurnal

T.M. Scanlon, Jr. (1978-9), "*Freedom of Expression and Categories of Expression*," University of Pittsburg Law Review.

Frank La Rue. 2011. *Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*.

Albert Hasibuan. 2008. "*Politik Hak Asasi Manusia (HAM) dan UUD 1945*". Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. VIII, No. 1.

John W, Johnson.2001. "*Peran Media Bebas*".Demokrasi.Office of International Information Programs U.S. Departement of State.No. 7.

John December. 2006. "*Defining Units of Analysis for Internet-based Communication*".Journal of Computer Mediated Communication. Vol. 5, No. 1.

M. Aliamsyah. 2008. "*Kebebasan Memperoleh dan Menyampaikan Informasi dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Jurnal Legislasi Indonesia.Vol. 5, No. 4.

R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2009. "*Kebebasan Berekspresi, Penelusuran dalam Konstitusi Indonesia*". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6, No. 1.

Peraturan Perundang – undangan

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948

Kovenan Hak Sipil Dan Politik 1966.

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil Dan Politik

Undang – Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

Putusan MK dalam perkara No.6-13-20/PUU-VIII/2010

Internet

<http://internetrightsandprinciples.org>.

<http://info.worldbank.org/etools>.

<http://www.un.org/en/documents/udhr/>

<http://www.itu.int/>

<http://www.statista.com/>

<http://www.yancearizona.wordpress.com>

<http://www.komnasham.go.id>

<http://www.mypersonallibraryonline.com>

<http://www.state.gov/g/drl/irf/rpt>

<http://www.tempointeraktif.com>